



**ANALISIS DETERMINAN PENGANGGURAN TERHADAP
KEMISKINAN DI 5 KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains Universitas
Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**IWAN SYAHPUTRA
NPM 1515210031**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tingkat Pengangguran, Pajak, Tenaga Kerja, PDRB, Investasi, Konsumsi, UKM dan IPM yang relevan dalam mempengaruhi Kemiskinan di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan data skunder atau time series yaitu dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Model analisis data dalam penelitian ini adalah model CFA (*Confirmatory Factor Analysis*). Hasil analisis CFA menunjukkan bahwa Pada tabel total variance explaind, ternyata terdapat tiga faktor atau komponen yang nilai eigenvalues-nya diatas 1 dengan nilai diatas 0,5 yaitu Tenaga Kerja, UKM (Usaha Kecil Menengah) dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Artinya hanya 3 variabel yang lanjut pada metode analisis selanjutnya. Lalu model analisis dengan menggunakan *Path Analysis* (Analisis Jalur) yang menghasilkan bahwa pengangguran tidak berfungsi sebagai variabel intervening antara tenaga kerja terhadap kemiskinan di 5 Kab/Kota Sumatera Utara. Pengangguran berfungsi sebagai variabel intervening antara UKM terhadap kemiskinan di 5 Kab/Kota Sumatera Utara. Pengangguran tidak berfungsi sebagai variabel intervening antara UKM terhadap kemiskinan di 5 Kab/Kota Sumatera Utara. Sedangkan model analisis dengan menggunakan Regresi Panel yaitu menunjukkan bahwa Tenaga Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan. UKM (Usaha Kecil Menengah) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan. Dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan.

Kata kunci : pengangguran, pajak, tenaga kerja, PDRB, investasi, Konsumsi, UKM, IPM dan kemiskinan

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Unemployment, Tax, Labor, GRDP, Investment, Consumption, SME and HDI levels that are relevant in influencing poverty in 5 districts / cities in North Sumatra Province. This study uses secondary or time series data from 2013 to 2017. The data analysis model in this study is the CFA (Confirmatory Factor Analysis) model. The CFA analysis results show that in the total variance table explained, it turns out that there are three factors or components whose eigenvalues value is above 1 with values above 0.5, namely Labor, UKM (Small and Medium Enterprises) and HDI (Human Development Index). This means that only 3 variables are advanced in the next analysis method. Then the analysis model using Path Analysis which results in unemployment not functioning as an intervening variable between labor and poverty in 5 North Sumatra Districts / Cities. Unemployment functions as an intervening variable between SMEs towards poverty in 5 North Sumatra Districts / Cities. Unemployment does not function as an intervening variable between SMEs to poverty in 5 North Sumatra Districts / Cities. While the analysis model uses Panel Regression which shows that Labor has a significant effect on Poverty. SMEs (Small and Medium Enterprises) have no significant effect on poverty. And HDI (Human Development Index) has a significant effect on poverty.

Keywords: unemployment, tax, labor, GDP, investment, consumption, SMEs, HDI and poverty

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasin Masalah	6
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
F. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teori	10
1. Teori Kemiskinan	10
2. Teori Pengangguran	12
3. Teori Pajak	14
4. Teori Jumlah Tenaga Kerja	16
5. Teori PDRB	17
6. Teori Investasi	19
7. Teori Konsumsi	20
8. Teori UKM	22
9. Teori IPM	26

B. Penelitian Terdahulu	28
C. Kerangka Konseptual	39
D. Hipotesis	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan Penelitian	41
B. Tempat dan Waktu Penelitian	41
C. Definisi Operasional Variabel	42
D. Jenis dan Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Data	43
1. <i>Confirmatory Factor Analysis (CFA)</i>	43
2. Metode Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	44
3. Metode Regresi Panel	46
a. Model Efek Tetap (<i>Fixed Effect</i>)	46
b. Uji Chow (<i>Chow Test</i>)	46
c. <i>Hausman Test</i>	48
d. Uji Kesesuaian (<i>Test Goodness of Fit</i>)	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Hasil Penelitian	51
1. Perkembangan Perekonomian 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara (Medan, Tapanuli Selatan, Langkat, Simalungun dan Deli Serdang	51
2. Hasil Uji CFA (<i>Confirmatory Factor Analysis</i>)	57
a. Hasil Analisa Data <i>Confirmatory Factor Analysis</i> (CFA)	57
3. Hasil Uji Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	63
a. Uji Asumsi Klasik	63
1) Uji Normalitas Data	63
2) Uji Autokorelasi	64
b. Hasil Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan Melalui Pengangguran	65

1) Interpretasi Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan Melalui Pengangguran Sebagai Variabel Intervening	66
c. Hasil UKM Terhadap Kemiskinan Melalui Pengangguran	68
1) Interpretasi UKM Terhadap Kemiskinan Melalui Pengangguran Sebagai Variabel Intervening	69
d. Hasil IPM Terhadap Kemiskinan Melalui Pengangguran	71
1) Interpretasi IPM Terhadap Kemiskinan Melalui Pengangguran Sebagai Variabel Intervening	72
4. Hasil Uji Regresi Panel	74
B. Pembahasan	79
1. Pembahasan <i>Confirmatory Factor Analysis</i> (CFA)	79
2. Pembahasan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	81
a. Analisis Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan Melalui Pengangguran Sebagai Variabel Intervening	81
b. Analisis Pengaruh UKM Terhadap Kemiskinan Melalui Pengangguran Sebagai Variabel Intervening	82
c. Analisis Pengaruh IPM Terhadap Kemiskinan Melalui Pengangguran Sebagai Variabel Intervening	84
3. Pembahasan Regresi Panel	86
a. Koefisien Regresi Tenaga Kerja	86
b. Koefisien Regresi UKM	87
c. Koefisien Regresi IPM.....	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	89
A. Kesimpulan	89
1. Kesimpulan CFA (<i>Confirmatory Factor Analysis</i>)	89
2. Kesimpulan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	89
3. Kesimpulan Panel Regresi	91
B. Saran-Saran	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Penduduk Miskin di 5 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera	4
Tabel 1.2	Perbedaan Penelitian	9
Tabel 2.1	Review Penelitian terdahulu	28
Tabel 3.1	Skedul Proses Penelitian	41
Tabel 3.2	Definisi Operasional Variabel	42
Tabel 4.1	KMO and Bartlett's Test	57
Tabel 4.2	Communalities	58
Tabel 4.3	Total Variance Explained	59
Tabel 4.4	Component Matrix ^a	61
Tabel 4.5	Rotated Component Matrix ^a	62
Tabel 4.6	Model Summary ^b	64
Tabel 4.7	Model Summary	65
Tabel 4.8	Coefficients ^a	65
Tabel 4.9	Model Summary	65
Tabel 4.10	Coefficients ^a	65
Tabel 4.11	Model Summary	68
Tabel 4.12	Coefficients ^a	68
Tabel 4.13	Model Summary	68
Tabel 4.14	Coefficients ^a	69
Tabel 4.15	Model Summary	71
Tabel 4.16	Coefficients ^a	71
Tabel 4.17	Model Summary	72
Tabel 4.18	Coefficients ^a	72
Tabel 4.19	Hasil Estimasi Dengan <i>Pooled Least Square</i>	74
Tabel 4.20	Hasil Estimasi <i>Pooled Least Square</i> Dengan <i>Fixed Effect Model</i>	75
Tabel 4.21	Hasil Uji Chow	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Data penduduk Miskin di 5 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara	4
Gambar 2.1	Hubungan antara Kemiskinan dan Keberadaan/Pertumbuhan UMK Lewat Dua Sisi Pasar yang Berbeda	24
Gambar 2.2	Efek Penggandaan terhadap Kesempatan Kerja dari Keberadaan UMK.	26
Gambar 2.3	Kerangka Konseptual CFA	39
Gambar 2.4	Kerangka Konseptual Path Analysis	39
Gambar 2.5	Kerangka Konseptual Regresi Panel	40
Gambar 4.1	Scree Plot	60
Gambar 4.2	Histogram Kemiskinan	63
Gambar 4.3	P-Plot Kemiskinan	64
Gambar 4.4	Pengaruh Antara Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan Melalui Pengangguran	67
Gambar 4.5	Pengaruh Antara UKM Terhadap Kemiskinan Melalui Pengangguran	70
Gambar 4.6	Pengaruh Antara IPM Terhadap Kemiskinan Melalui Pengangguran	73

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan kesempatan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat mengajukan proposal ini yang disusun guna memenuhi syarat untuk pembuatan Skripsi. Adapun judul yang penulis ajukan adalah sebagai berikut :
“Analisis Determinan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di 5 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pembuatan skripsi ini nantinya akan menghadapi banyak permasalahan dan kesulitan, yang di sebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu bantuan dan bimbingan dari semua pihak sangat diharapkan. Akhirnya penulis mengharapkan semoga dalam penyusunan skripsi ini nantinya dapat berguna bagi penulis dan para pembaca sekalian. Mudah- mudahan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Dalam mempersiapkan sekripsi ini, penulis banyak menerima bantuan berupa bimbingan dan petunjuk. Untuk itu pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan dorongan, nasehat, kasih sayang, do'a, dan dukungan material.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Saimara Sebayang, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
5. Bapak Drs.H. Kasim Siyo, M.Si., Ph.D selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Rahmad Sembiring, S.E., M.SP selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.
7. Kepada seluruh keluarga besar Misno dan Sulastri, Paskibra Paspenda SMP 2 Hamparan Perak, Yayasan Pendidikan Delisha, remaja mesjid desa Tandam Hilir 2, adikku Novita Rahmadani, Dodi Andika dan Deswita Wulandari. Terima kasih atas semangat, dorongan, dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
8. Kepada seluruh sahabat-sahabatku, Habibah Wahyuni, Emma Soraya, Rizalul Arifin, Muhammad Siddiq, Novia Astriani, Rudi, Ammar, Andre, Awi, Oji, Adit, Aldi, Agus, Wendy (ompong), Teguh, Rifki, Kiemas, Amri, Duha, Dimas dan Erika Puspita Sari. Terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.

Akhirnya penulis mengharapkan proposal ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan juga para pembaca. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin

Medan, Mei 2019

Penulis,

IWAN SYAHPUTRA

1515210031

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah global yang dihadapi dan menjadi perhatian orang di dunia. Negara miskin masih dihadapkan antara masalah pertumbuhan dan distribusi pendapatan yang tidak merata sementara itu, banyak negara berkembang yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun, kurang memberikan manfaat bagi penduduk miskinnya (Todaro dan Smith, 2006:231; Kuncoro, 2003:101). Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dihadapkan pada masalah kemiskinan yang tidak bisa diabaikan. Menurut Badan Pusat Statistik (2014), Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin setiap tahunnya, namun masih terdapat sekitar 29,13 juta penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2012.

Menurut BPS (2014) dengan lebih terperinci lagi, kemiskinan mempunyai dimensi seperti di bawah:

1. Penggambaran situasi kekurangan bahan keperluan asasi seperti kekurangan makanan, pakaian dan kediaman.
2. Penggambaran keadaan ekonomi di mana seseorang itu tidak mempunyai modal ataupun daya pengeluaran yang dapat menjana kekayaan.

Menurut kriteria bank dunia, kemiskinan itu ditakrifkan sebagai penghidupan dengan perbelanjaan kurang daripada US\$ (PPP) 2 sehari. Manakala bagi mereka yang hidup dengan perbelanjaan kurang daripada US\$(PPP) 1 sehari, mereka dianggap menghadapi kemiskinan yang berketerlaluan.

Menurut bank dunia, kemiskinan dipahami dalam berbagai cara.

Pemahaman utamanya mencakup:

1. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
2. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua gambaran yang lainnya.
3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal. Perkecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang. Pengukur kemiskinan.
4. Kemiskinan bisa dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu Kemiskinan absolut dan Kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat / negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yg cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa).

5. Bank Dunia mendefinisikan *Kemiskinan absolut* sebagai hidup dg pendapatan dibawah USD \$1/hari dan *Kemiskinan menengah* untuk pendapatan dibawah \$2 per hari, dengan batasan ini maka diperkirakan pada 2001 1,1 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari \$1/hari dan 2,7 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari \$2/hari.^[1] Proporsi penduduk negara berkembang yang hidup dalam Kemiskinan ekstrem telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada 2001.^[1] Melihat pada periode 1981-2001, persentase dari penduduk dunia yang hidup dibawah garis kemiskinan \$1 dolar/hari telah berkurang separuh. Tetapi, nilai dari \$1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut.
6. Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia berkembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region. Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota dan ghetto yang miskin. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin, atau kelompok orang-orang miskin, dan dalam pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang dianggap miskin. Untuk menghindari stigma ini, negara-negara ini biasanya disebut sebagai negara berkembang.

Menurut Arsyad (2010:300), kemiskinan dapat terjadi karena anggota masyarakat tidak atau belum berpartisipasi dalam proses perubahan yang disebabkan ketidakmampuan dalam kepemilikan faktor produksi atau kualitas yang kurang memadai. Sementara menurut Sen dalam Todaro dan Smith (2006: 23), kemiskinan bukan suatu kondisi kekurangan suatu komoditi ataupun masalah kepuasan dari komoditi tersebut namun kemiskinan lebih cenderung merupakan kondisi masyarakat yang kurang dapat memaksimalkan fungsi dan mengambil manfaat dari komoditi

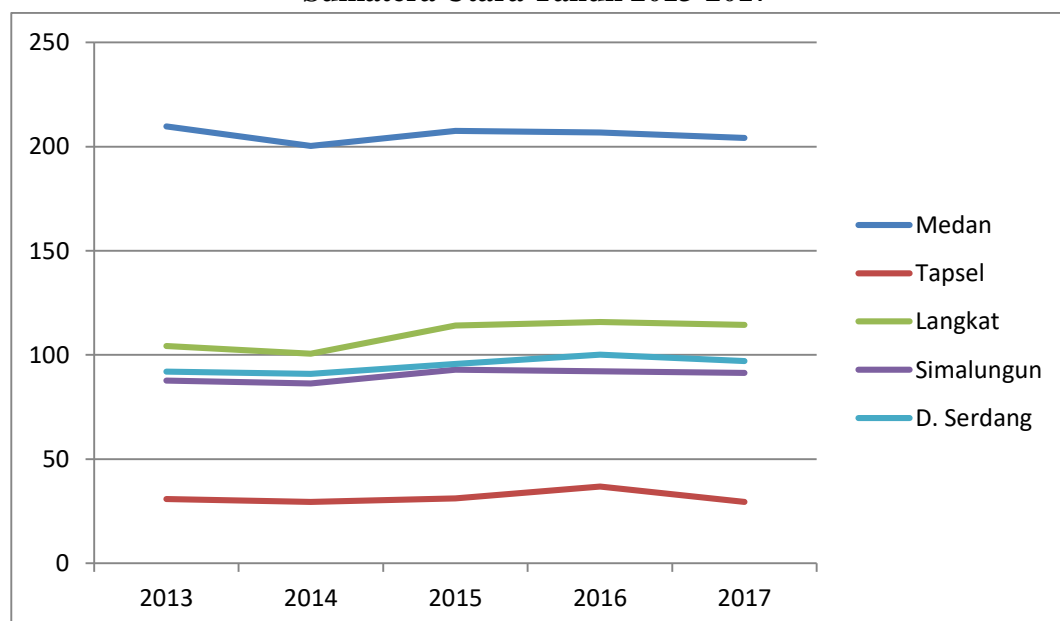
tersebut. Masyarakat menjadi miskin disebabkan oleh rendahnya modal manusia, seperti pendidikan, pelatihan, atau kemampuan membangun. Mereka juga memiliki modal fisik dalam jumlah yang sangat kecil. Lebih lanjut, jika mereka memiliki modal manusia dan fisik yang baik, mungkin mereka tidak memiliki kesempatan bekerja karena adanya diskriminasi.

Tabel 1.1 Data Penduduk Miskin di 5 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017 (Ribu/Jiwa)

No	Tahun	Kabupaten/Kota				
		Medan	Tapsel	Langkat	Simalungun	D. Serdang
1.	2013	209,69	30,77	104,31	87,72	91,97
2.	2014	200,32	29,38	100,63	86,25	90,92
3.	2015	207,5	31,20	114,19	92,89	95,65
4.	2016	206,87	36,84	115,79	92,19	100,09
5.	2017	204,22	29,48	114,41	91,35	97,09

Sumber : BPS

Grafik 1.1 Data penduduk Miskin di 5 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa data berbentuk fluktuasi yang beragam. Di Kota Medan dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 angka kemiskinan menurun menjadi 200,32 ribu/jiwa dimana sebelumnya pada tahun 2013 yaitu sebesar 209,69 ribu/jiwa, kemudian kemiskinan kembali meningkat pada tahun 2015 menjadi 207,5 ribu/jiwa, kembali turun pada tahun 2015 menjadi 206,87 ribu/jiwa dan kembali turun lagi pada tahun 2017 menjadi 204,22 ribu/jiwa. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Langkat terus meningkat mulai tahun 2014 sampai tahun 2016, dan kembali menurun pada tahun 2017. Angka kemiskinan tertinggi di Kabupaten Langkat terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 115,79 ribu/jiwa. Hal ini diakibatkan tidak meratanya pembangunan di Kabupaten Langkat, sehingga pemerintah akan mengatasi kemiskinan melalui konsep Membangun Desa dan Desa Membangun yang selaras dengan Nawacita Pemerintah Pusat untuk mengetaskan kemiskinan, yaitu dengan memprioritaskan pembangunan dari desa dan misi ketiga Pemkab Langkat yang memantapkan pembangunan desa. Dari keseluruhan Kabupaten/Kota yang dimasukkan dalam penelitian ini, angka kemiskinan di Kabupaten Langkatlah yang tertinggi.

Di Kabupaten Tapanuli Selatan, angka kemiskinan selalu meningkat sampai angka peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar 36,84 ribu/jiwa dan turun pada tahun 2017 yaitu menjadi 29,48 ribu/jiwa. Pada Kabupaten Simalungun angka kemiskinan terus meningkat mulai tahun 2013, sampai angka kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 92,89 ribu/jiwa, dan pada tahun-tahun selanjutnya angka kemiskinan terus menurun. Di Kabupaten Deli Serdang angka kemiskinan terus meningkat mulai tahun 2014, sampai peningkatan kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar

100,09 ribu/jiwa dan kembali turun pada tahun 2017 menjadi 97,09 ribu/jiwa. Penyebab kemiskinan adalah karena minimnya ketersediaan lapangan kerja sehingga menimbulkan banyaknya pengangguran. Tidak hanya itu, masih rendahnya tingkat pendidikan, dan belum meratanya pembangunan di setiap daerah juga menjadi faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Deli Serdang.

Alasan penulis mengambil 5 Kabupaten/Kota (Medan, Tapanuli Selatan, Langkat, Simalungun dan Deli Sedang) yaitu melihat perkembangan perekonomian yang dekat dengan pusat industri dan yang jauh dengan pusat industri. Dimana pusat industrinya yaitu Medan dan yang dekat dengan pusat industri adalah Langkat dan Deli Serdang, sedangkan yang jauh dengan pusat industri adalah Tapanuli Selatan dan Simalungun. Dimana pusat industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan pengolahan yang dilengkapi dengan perasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan serta dikelola oleh perusahaan kawasan industri (Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 1989).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas serta untuk memperoleh kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk miskin tertinggi di Kota Medan pada tahun 2013 sebesar 209,68.
2. Angka kemiskinan terus meningkat sejak tahun 2014 sampai tahun 2016 di Kabupaten Tapanuli Selatan.

3. Angka kemiskinan terus meningkat sejak tahun 2014 sampai tahun 2016 di Kabupaten Langkat.
4. Terjadi penurunan angka kemiskinan pada tahun 2016 dan tahun 2017 di Kabupaten Simalungun.
5. Jumlah penduduk miskin tertinggi di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2016 sebesar 100,09 ribu/jiwa.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi agar pembahasannya lebih fokus dan terarah serta tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan. Dengan demikian penulis membatasi masalah hanya pada pengangguran dan kemiskinan di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Faktor manakah (Pengangguran, Pajak, Tenaga Kerja, PDRB, Investasi, Konsumsi, UKM dan IPM) yang relevan dalam mempengaruhi Kemiskinan di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah faktor-faktor yang relevan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di 5 Kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara melalui pengangguran sebagai variabel intervening ?
3. Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang paling rendah tingkat kemiskinannya?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yang diambil berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis Faktor manakah (Pengangguran, Pajak, Tenaga Kerja, PDRB, Investasi, Konsumsi, UKM dan IPM) yang relevan dalam mempengaruhi Kemiskinan di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
2. Menganalisis faktor-faktor yang relevan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di 5 Kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara melalui pengangguran sebagai variabel intervening.
3. Menganalisis Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara yang paling rendah tingkat kemiskinannya.

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang kemiskinan di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
2. Menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam mengatasi masalah Kemiskinan di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
3. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca tentang faktor-faktor kemiskinan di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
4. Sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih jauh terutama yang berkaitan dengan pengangguran, Pajak, Jumlah Tenaga Kerja, PDRB, Investasi, Konsumsi, UKM, dan IPM Terhadap kemiskinan.

F. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Okta ryan Pranata Yudha (2013), yang berjudul: "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Upah minimum tingkat Pengangguran Terbuka, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia". Sedangkan penelitian ini berjudul: "Analisis Determinan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara".

Tabel 1.2 Perbedaan penelitian terletak pada:

No	Perbedaan	Okta pranataYudha (2013)	Ryan Iwan Syahputra (2018)
1	Variabel	Kemiskinan, pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, tingkat pengangguran terbuka, dan Inflasi	Pengangguran, Kemiskinan, Pajak, PDRB, Konsumsi, Jumlah Tingkat Tenaga Kerja, Investasi, UKM dan IPM
2	Model	Regresi Linier data panel dengan metode FEM	CFA, Path Analysis, Panel
3	Lokasi	Indonesia	5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
4	Waktu	2009-2011	2013-2017

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Kemiskinan

Gunawan Sumodiningrat (2000:90) menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal.

Menurut Abdiyanto (2016) Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat perlindungan dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Saat ini, pengukuran angka kemiskinan yang digunakan oleh BPS dengan berpatok pada Bank Dunia, angka itu didapatkan dengan menggunakan perkiraan konsumsi yang dikonversikan ke dollar AS dengan menggunakan kesetaraan daya beli per hari, bukan dengan nilai tukar dollar AS resmi. Angka konversi tersebut menunjukkan banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah kebutuhan barang dan jasa, dimana dengan jumlah tersebut dapat dibeli sebesar 1 dollar AS di Amerika Serikat. Garis kemiskinan di Sumatra Utara ditetapkan sebesar Rp 423.696 per kapita per bulan. Garis kemiskinan itu terbentuk dari agregasi garis kemiskinan diwilayah perkotaan dan wilayah pedesaan di Sumatra

Utara, berdasarkan hasil survey ekonomi nasional (susenas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada September 2017.

Secara garis besar, kemiskinan dapat ditetapkan menjadi dua aspek, yaitu aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer berupa miskin aset (harta), organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan. Sementara aspek sekunder berupa miskin terhadap jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi (Arsyad, 2010: 299). Menurut Nugroho dan Dahuri (2012), kemiskinan merupakan suatu kondisi absolut atau relatif di suatu wilayah di mana seseorang atau kelompok masyarakat tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai tata nilai atau norma yang berlaku. Jika dipandang dari aspek ekonomi, kemiskinan menunjuk pada gap antara lemahnya *purchasing power* dan keinginan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Secara konsep, kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut memandang kemiskinan dalam suatu ukuran yang bersifat mutlak yang bermuara atau berwujud sebagai garis, titik, atau batas kemiskinan. Sementara kemiskinan relatif, memandang kemiskinan dalam suatu ukuran yang dipengaruhi ukuran-ukuran lain yang berhubungan dengan proporsi atau distribusi (Nugroho dan Dahuri, 2012: 184). Seseorang atau keluarga dapat dikatakan miskin atau hidup dalam kemiskinan jika pendapatan mereka atau akses mereka terhadap barang dan jasa relatif rendah dibandingkan kebanyakan orang dalam perekonomian. Selain itu, kemiskinan dapat dilihat sebagai tingkat absolut dari pendapatan atau standar hidup (Van den Berg, 2005: 509).

Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho dan Dahuri,

2012). Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004).

2. Teori Pengangguran

Pengangguran merupakan “suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan” Kaufman dan Hotckiss, (2000:131). Menurut Ida Bagoes Mantra pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Dan pengangguran menurut Dumairy yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan, lengkapnya orang yang tidak bekerja dan (masih atau sedang) mencari pekerjaan.

Pengangguran merupakan “suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut” Sukirno (2000:127). Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta. Menurut Sukirno (2000:472), pengangguran adalah “suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya”. Seseorang yang tidak bekerja,

tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Para pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud untuk mencari keuntungan. Hal tersebut hanya akan diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang yang mereka produksikan. Semakin besar permintaan semakin besar pula barang dan jasa yang akan mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat diantara 12 tingkat pendapatan nasional yang dicapai Gross National Product (GNP) dengan penggunaan tenaga kerja yang dilakukan, semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian.

Pengangguran dapat terjadi akibat dari tingginya angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang luas serta penyerapan tenaga kerja yang persentasenya cenderung kecil. Hal ini terjadi karena rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja. Menurut Mankiw (2000:140), menyatakan bahwa: Pengangguran akan selalu muncul dalam satu perekonomian karena beberapa alasan. Alasan pertama adalah adanya proses pencarian kerja, yaitu dibutuhkannya waktu untuk mencocokkan para pekerja dan pekerjaan. Alasan kedua adalah adanya kekakuan upah. Kekakuan upah ini dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya kebijakan upah minimum, daya tawar kolektif dari serikat pekerja, dan upah efisiensi. Dari beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengangguran adalah kondisi saat seseorang tidak mempunyai pekerjaan atau tidak bekerja dalam usia produktif.

Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara. Jika rumah tangga tersebut memiliki batasan likuiditas (yang berarti bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini) maka pengangguran akan secara langsung mempengaruhi kemiskinan baik yang diukur dari sisi pendapatan (income poverty rate) maupun kemiskinan yang diukur dari sisi konsumsi (consumption poverty rate). Jika rumah tangga tersebut tidak menghadapi batasan likuiditas (yang berarti bahwa konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini) maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek.

3. Teori Pajak

Andriani dalam Waluyo (2013:2), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Dan menurut Soemitro dalam Resmi (2014:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang–undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi atau pengertian Pajak menurut Undang-Undang pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009, sebagai berikut : “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Menurut Rochmat Soemitro (dalam Suandy, 2011) dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Dengan penjelasan sebagai berikut : “dapat dipaksakan” artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti Surat Paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap 14 pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbale balik tertentu seperti halnya dengan retribusi.

Saat ini, kemiskinan masih menjadi salah satu masalah yang berlangsung di tiap generasi dan perlu segera dilakukan pemutusan rantai kemiskinan. Pajak dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut. Rantai kemiskinan harus diputus dengan memberikan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi kepada keluarga miskin. Untuk dapat menyediakan pelayanan dasar tersebut, Negara membutuhkan sumberdana yang berasal dari pajak. Pajak menjadi salah satu instrument yang sangat penting karena dapat mendistribusikan pendapatan dari masyarakat kaya untuk dapat memenuhi kebutuhan social dan jasa jasa dasar masyarakat miskin, “oleh karena itu penting membayar pajak.

Menurut Mahmudi (2015:145) menyatakan bahwa jika potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan semakin besar dan pemerintah daerah dapat mengotimalkan sumber penerimaannya dengan meningkatkan target dan realisasi

pajak bumi dan bangunan yang berlandaskan potensi sesungguhnya, hal ini dapat meningkatkan total hasil penerimaan daerah. Sehingga akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

4. Teori Jumlah Tenaga Kerja

Menurut Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan No. 14 Tahun 1969, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hubungan ini maka pembinaan tenaga kerja merupakan peningkatan kemampuan efektivitas tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan. Sedangkan menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Adapun menurut Dr. A. Hamzah SH, tenaga kerja meliputi tenaga kerja yang bekerja didalam maupun diluar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi tenaga kerja itu sendiri, baik tenaga fisik maupun fikiran. Menurut Suparmoko dan icuk ranggabawono tenaga kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja dan mempunyai pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan suatu kegiatan lain seperti sekolah, kuliah dan mengurus rumah tangga. Peranan para pelaku ekonomi tidak akan pernah lepas dalam mensejahterakan masyarakat dari jerat kemiskinan dan kemajuan ekonomi yakni pemerintah yang berperan sebagai instrumen kebijakan publik dan fiskal, swasta yang berperan dalam pengembangan investasi dan masyarakat yang berperan sebagai input dari faktor produksi dan jaminan terciptanya pasar dalam

perekonomian (Gravitiani, 2006). Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sebagai modal untuk pembangunan daerah akan menjadi jalan untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang terjadi (Pascual, 2006).

Jumlah penduduk yang banyak, mempunyai akibat bagi kesempatan kerja. Jumlah penduduk yang banyak disertai kemampuan dan usaha meningkatkan produktivitas dan membuka lapangan kerja baru. Dan sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian dapat memenuhi kebutuhannya dan mampu mengurangi angka kemiskinan.

5. Teori PDRB

Menurut Todaro (2002) PDRB adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah (baik itu yang dilakukan oleh penduduk daerah maupun penduduk dari daerah lain yang bermukim di daerah tersebut). Menurut Subandi (2011) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk, atau apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak. Menurut Sukirno (2004), Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah perkembangan kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil berubah. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari pendapatan nasionalnya. Pendapatan nasional ini mengarah ke Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu nilai barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam suatu tahun

tertentu dengan menggunakan faktor-faktor produksi milik warganegaranya dan milik penduduk di negara-negara lain. Biasanya dinilai menurut harga pasar dan dapat didasarkan kepada harga yang berlaku dan harga tetap. PDRB merupakan total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah atau regional tertentu dan dalam kurun waktu tertentu biasanya satu tahun. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu.

Pendapatan suatu wilayah dapat diukur dari PDRB per kapita. PDRB per kapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita sering digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut (Thamrin, 2001). Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah yang dapat ditunjukkan dengan tingginya tingkat konsumsi yang diukur dengan pengeluaran per kapita. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang. Kondisi pendapatan dalam suatu negara (PDB)

dapat diukur dengan tiga cara yaitu dengan Produk Nasional Bruto (GNP), Produk Nasional Neto (NNP), dan pendapatan nasional. Yang mana dari ketiga ukuran tersebut dapat memberikan informasi yang sama tentang kondisi perekonomian. Jika PDB mengalami kenaikan maka ketiga ukuran pendapatan tersebut juga akan mengalami kenaikan, begitu sebaliknya. Sehingga untuk melihat fluktuasi perekonomian dapat menggunakan ukuran pendapatan yang mana saja (Mankiw, 2013). Begitu pula dengan pendapatan dalam suatu daerah dapat diukur dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB perkapita suatu wilayah belum bisa menggambarkan secara riil pendapatan yang diterima masing-masing penduduk karena masih dipengaruhi oleh produksi barang dan jasa. Sehingga digunakan pendekatan pendapatan perkapita yang dihitung dengan cara menghilangkan faktor bruto yang terdiri dari penyusutan dan pajak tidak langsung neto, serta ditambahkan pendapatan neto yang masuk wilayah tersebut, sehingga pendapatan perkapita dinilai lebih mendekati keadaan pendapatan sebenarnya di masyarakat (BPS, 2013).

6. Teori Investasi

Menurut Suharto (2006:4) “Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.” Investasi yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Tabungan dari sektor rumah tangga melalui institusi keuangan akan mengalir ke sektor perusahaan. Apabila para pengusaha menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang modal, pengeluaran tersebut dinamakan investasi. Investasi adalah

pengeluaran penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi yang akan menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Menurut Sukirno (2000) kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

7. Teori Konsumsi

Teori konsumsi *Keynes* mengedepankan tentang analisis perhitungan statistik, serta membuat hipotesa berdasarkan observasi kasual. *Keynes* menganggap perhitungan fluktuasi ekonomi negara dapat dihitung berdasarkan besarnya konsumsi dan pendapatan belanja rumah tangga. Pada pengeluaran rumah tangga, selalu terdapat pengeluaran untuk konsumsi walaupun tidak memiliki pendapatan. Hal ini disebut sebagai pengeluaran konsumsi otonomus atau *autonomus consumption*. *Keynes* memiliki teori konsumsi absolut yang disebut sebagai Teori Konsumsi *Keynes* (*absolut income hypothesis*). *Keynes* berpendapat bahwa besarnya konsumsi rumah tangga, tergantung dari pendapatan yang dihasilkan. Perbandingan antara besarnya konsumsi dan pendapatan disebut

Keynes sebagai *Marginal Propensity to Consume* (MPC). MPC ini digunakan untuk mengukur bahwa semakin besar pendapatan yang dimiliki, maka tingkat konsumsi rumah tangga juga tinggi, dan begitu pula sebaliknya. Untuk menjelaskan teori Keynes tersebut, maka perlu dibuat rancangan perhitungan pendapatan dan konsumsi melalui Teori Konsumsi dengan Hipotesis Pendapatan Absolut. Teori tersebut menyatakan bahwa jumlah pengeluaran konsumsi berkaitan erat dengan pendapatan negara yaitu dapat mempengaruhi fluktuasi perekonomian negara, dimana hal tersebut dapat diukur berdasarkan harga konstan (dalam Case and Fair, 2002).

Konsumsi secara umum diartikan sebagai penggunaan barang dan jasa secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia (Rosyidi, 2002). Keynes mengemukakan bahwa konsumsi adalah fungsi positif dari pendapatan dan rumah tangga yang berpendapatan tinggi melakukan konsumsi pangan lebih sedikit dari rumah tangga yang berpendapatan rendah, karena pendapatannya yang lain dialokasikan pada konsumsi non pangan (dalam Case and Fair, 2002). Konsumsi yang dilakukan masyarakat bisa menjadi nilai sosial yang dipandang bahwa ketika seseorang mampu melakukan konsumsi dianggap mampu memenuhi kebutuhan dan dikategorikan sejahtera. Sedangkan mereka yang tidak mampu melakukan konsumsi dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan serta dikategorikan kurang sejahtera. Sehingga dikatakan konsumsi dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kemiskinan masyarakat (Nicholls, 2000). Hasil temuan Gan (2013) menunjukkan bahwa pada tahun 2008 di China terjadi peningkatan kemiskinan. Yang mana hal tersebut disebabkan karena menurunnya konsumsi yang dilakukan masyarakat. Demikian pula pada hasil penelitian Hurd (2006) menyatakan bahwa di Cambridge

terjadi peningkatan kemiskinan ketika masyarakatnya mengalami kesulitan dalam mengkonsumsi kebutuhan hidupnya. Sejalan dengan itu temuan dari Moav (2008) juga menyatakan bahwa konsumsi yang dilakukan oleh warga London memiliki peran pada kegiatan ekonomi negaranya. Pada suatu periode warganya banyak melakukan konsumsi dan pada tahun tersebut ternyata terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dari periode sebelumnya.

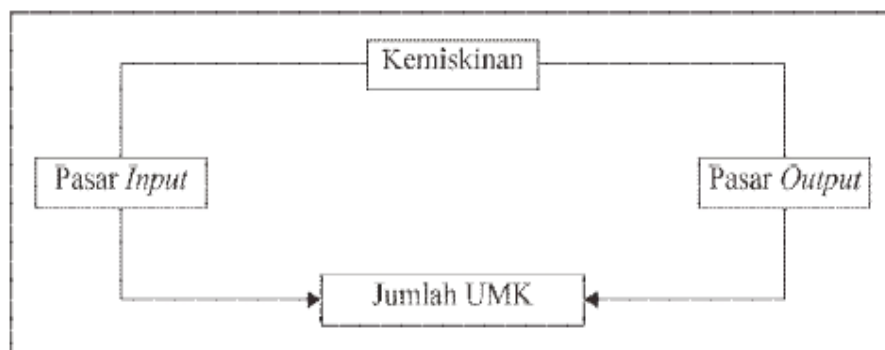
Teori konsumsi Keynes telah menyatakan dengan tegas bahwa faktor pendapatan itu memiliki pengaruh langsung terhadap konsumsi, semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi konsumsi, begitu sebaliknya. Oleh karena konsumsi mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan, maka faktor pendapatan dapat dikatakan juga memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kemiskinan melalui faktor konsumsi. Oleh karena itu, jelas bahwa pendapatan dan konsumsi memiliki pengaruh langsung terhadap kemiskinan.

8. Teori UKM

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang. Seperti di belahan dunia lainnya, usaha mikro dan kecil (UMK) juga memainkan peran yang sangat penting di dalam perekonomian di kawasan Asia, terutama sebagai sumber utama kesempatan kerja dan salah satu sumber penting pertumbuhan ekonomi. Dengan besar sumbangan terhadap penciptaan kesempatan kerja, dengan sendirinya kelompok usaha tersebut juga dianggap sangat penting untuk mengurangi pengurangan dan kemiskinan. Selain itu, UMK pada umumnya

memproduksi barang-barang konsumsi termasuk makanan dan minuman, pakaian jadi, alas kaki, dan perabotan rumah tangga dengan harga murah untuk kalangan masyarakat berpendapatan rendah, sehingga keberadaan mereka sangat membantu rumah tangga-rumah tangga miskin.

Secara teori, hubungan antara keberadaan UMK dan kemiskinan di suatu daerah bisa “positif” atau “negatif”. Positif dalam arti keberadaan UMK karena ada kemiskinan. Hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Secara umum dimanapun juga, sebuah perusahaan muncul karena ada daya tarik pasar, baik pasar *output* (peluang untuk menjual hasil produksi) dan pasar *input* (peluang untuk mendapatkan *input* untuk berproduksi). Hubungan ini juga berlaku bagi pertumbuhan UMK. Hanya saja, di banyak negara berkembang/miskin, keberadaan pasar *output* dan pasar *input* yang membuat jumlah UMK tumbuh pesat berhubungan erat dengan kemiskinan (Gambar 2.1). Dari sisi pasar *output*, hipotesisnya adalah sebagai berikut: semakin banyak orang miskin di sebuah daerah, semakin banyak jumlah UMK di daerah itu yang memproduksi barang dan jasa dengan harga murah yang terjangkau oleh kelompok miskin. Dalam kata lain, UMK memiliki segmen pasar tersendiri, yakni pasar bagi konsumen berpendapatan rendah. Tidak ada persaingan langsung antara UMK dan UMB yang memproduksi untuk konsumen berpendapatan tinggi. Hipotesis alternatifnya adalah: semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat/rendah tingkat kemiskinan di sebuah wilayah, semakin sedikit jumlah UMK di wilayah tersebut. Jadi, di dalam kasus ini, UMK muncul atau jumlahnya bertambah karena ada factor ‘penarik’, yakni adanya permintaan konsumen.

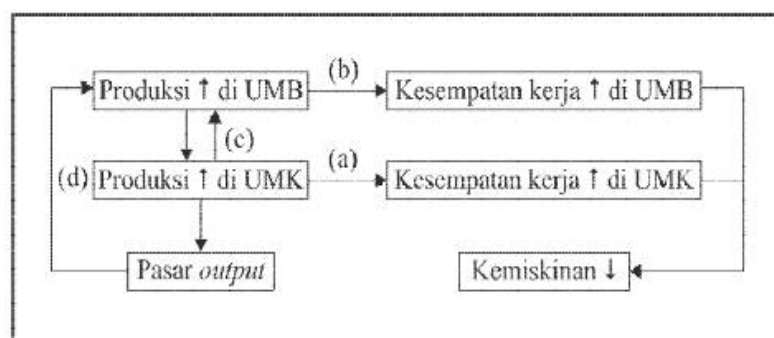


Gambar 2.1 Hubungan antara Kemiskinan dan Keberadaan/Pertumbuhan UMK Lewat Dua Sisi Pasar yang Berbeda.

Dari sisi pasar *input*, misalnya pasar tenaga kerja, semakin banyak orang miskin yang bisa disebabkan oleh banyaknya pengangguran, atau pekerja dengan upah rendah seperti pekerja harian di sektor bangunan, semakin banyak orang membuka usaha sendiri dalam skala mikro atau kecil (karena modal yang dimiliki sedikit dan pengetahuannya terbatas untuk membuka usaha lebih besar dan kompleks). Jadi, hipotesanya adalah sebagai berikut: semakin banyak pengangguran atau semakin banyak pekerja dengan upah murah, semakin banyak kemiskinan, maka semakin banyak jumlah UMK baik sebagai sumber satu-satunya pendapatan (bagi orang-orang miskin karena menganggur) atau sebagai sumber pendapatan tambahan (bagi orang-orang miskin karena sumber utama pendapatannya tidak mencukupi). Di dalam kasus ini, UMK berfungsi sebagai ‘penampung terakhir’ (*last resort*) bagi orang atau keluarga miskin. UMK muncul karena ada faktor ‘pendorong’, yakni penawaran sumber daya manusia.

Sedangkan negatif artinya kemiskinan berkurang karena adanya UMK, dan dalam menganalisisnya harus dilihat dampak keseluruhan dari keberadaan UMK, yakni lewat jalur-jalur langsung dan tidak langsung, yang menciptakan efekefek penggandaan (*multiplier*). Jalur-jalur langsung lewat mana keberadaan UMK

berdampak positif terhadap pengurangan jumlah orang miskin adalah besarnya kesempatan kerja yang diciptakan oleh UMK itu sendiri (efek kesempatan kerja langsung: jalur (a) di Gambar 2) dari kegiatan produksinya. Produk yang dibuat bisa bersifat barang jadi yang dikonsumsi langsung oleh konsumen (misalnya makanan dan minuman) atau barang perantara sebagai bahan baku atau *input* bagi kelompok usaha lain (misalnya UMB) lewat keterkaitan produksi *subcontracting* (garis (c)). Dilihat dari sisi UMK, hubungan produksinya dengan UMB tidak hanya ke depan (*forward linkage*), tetapi juga ke belakang (*backward linkage*), misalnya UMK pembuat makanan membeli komoditas pertanian sebagai bahan bakunya. Maka, kesempatan kerja yang tercipta di UMB karena kegiatan produksinya yang dimungkinkan dengan adanya pasokan *input* dari UMK (kasus ke depan), maupun di sektor pertanian yang bisa berproduksi karena adanya permintaan dari UMK (kasus ke belakang) merupakan efek kesempatan kerja tidak langsung (garis (b)) dari keberadaan UMK. Efek kesempatan kerja tidak langsung dari keberadaan UMK juga bisa terjadi apabila para pekerja dan pemilik UMK membelanjakan pendapatan mereka untuk pembelian barang dan jasa yang dihasilkan oleh UMB (garis (d)), yang selanjutnya menjadi pendorong pertumbuhan produksi dan kesempatan kerja di kelompok usaha terakhir tersebut.



Gambar 2.2 Efek Penggandaan terhadap Kesempatan Kerja dari Keberadaan
UMK.

Dari uraian teoretis di atas, jelas bahwa pentingnya keberadaan atau pertumbuhan UMK terhadap ekonomi dan khususnya pengurangan kemiskinan di daerah sangat tergantung pada hubungan bisnis antara UMK dan ekonomi daerah. Semakin kuat hubungan bisnis atau produksi antara UMK dengan usaha-usaha lainnya di daerah, yang artinya semakin kecil 'kebocoran ekonomi lokal', semakin besar efek penggandaan terhadap pengurangan kemiskinan di daerah, atau semakin banyak pengurangan jumlah orang miskin. Yang dimaksud 'kebocoran ekonomi lokal' adalah misalnya untuk memproduksi UMK di suatu daerah membeli bahan baku dari sektor hulu di luar daerah, atau UMK membuat produk perantara sebagai *input* bagi sektor hilir yang berlokasi di luar daerah. Jadi, bukan saja nilai tambah ekonomi lokal berkurang, kesempatan kerja yang sebenarnya bisa tercipta apabila sektor hulu dan sektor hilir tersebut berada di dalam daerah juga hilang.

9. Teori IPM

Penyebab kemiskinan yang terdapat pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*) Nurkse 1953 (dalam Kuncoro, 2000:132), adanya keterbelakangan dan ketertinggalan SDM (yang tercermin oleh rendahnya IPM), ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas (berdampak pada tingginya pengangguran). Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan (tercermin oleh rendahnya upah) yang akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi

berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah (Mudrajad Kuncoro, 2000).

Kualitas sumber daya manusia dapat menjadi faktor penyebab utama terjadinya kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Mudrajad (2006) IPM bermanfaat untuk membandingkan kinerja pembangunan manusia baik antar negara maupun antar daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Dengan masyarakat yang sehat dan berpendidikan yang baik, peningkatan produktifitas masyarakat akan meningkatkan pula pengeluaran untuk konsumsinya, ketika pengeluaran untuk konsumsi meningkat, maka tingkat kemiskinan akan menurun. Disisi lain, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Rendahnya produktivitas berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin (Sukmaraga, 2011: 8).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata-sederhana dari tiga indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, yaitu: Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, dan Indeks Standar Hidup Layak. Rumus umum yang dipakai adalah sebagai berikut :

$$\text{IPM} = 1/3 (\text{X1} + \text{X2} + \text{X3})$$

Keterangan :

X1 = Indeks Harapan Hidup

X2 = Indeks Pendidikan

X3 = Indeks tandar Hidup Layak (BPS, 2017).

B. Penelitian Terdahulu

Review Penelitian terdahulu :

No	Peneliti	Variabel	Model	Hasil
1.	Noor Zuhdiyati “Analisis fakto- faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia selama lima tahun terakhir”	PDB, IPM, TPT, Kemiskinan	Pendekatan kuantitatif dengan Uji Regresi	Menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara IPM dengan kemiskinan, sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi dan TPT tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.
2.	Dya Ayu Fotaloka, i waryan subagiarto, fivien muslihatinningsih “Determinan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 20017- 2011	AHM, AHH, Kemiskinan, PDRB, TPT	Regresi data panel dengan pendekatan REM	Berdasarkan dari hasil Analisi, dapat diketahui bahwa variabel PDRB dan AHH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel jumlah penduduk miskin di Jawa Timur, variabel TPT berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel jumlah penduduk miskin di Jawa Timur dan variabel AMH berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel jumlah penduduk miskin di Jawa Timur

3.	Sugi Yarto, Jangkung Handoyo Mulyo, Rosalia Natalia Seleky “ Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan rumah tangga” dikabupaten Bojonegoro	Kemiskinan, ketimpangan, pendapatan, Rumah tangga	Analisi tabel	Menunjukkan angka kemiskinan yang tinggi berdasarkan kriteria ADB, dan bank Dunia namun berdasarkan BPS angka kemiskinan cukup rendah. Berdasarkan hasil indeks FGI diketahui tingkat kedalaman kemiskinan sebesar 0,05 sementara tingkat keparahan kemiskinan sebesar 0,02 lebih lanjut, tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam skala sedangkan dengan indeks GINI 0,459
4.	Rusdarti, Lesta Karolina sebayang “faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi Jawa tengah’	Belanja publik, PDRB, kemiskinan	Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan model Regresi	Menunjukkan bahwa penurunan tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, faktanya bahwa jumlah orang miskin didaerah lebih besar dari pada kota. Secara statisitik , PDRB dan variabel lainnya seperti pengeluaran publik berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan sedangkan pengangguran

				pengaruhnya tidak signifikan.
5.	Juli Panglima saragih “Analisis kebijakan Pemerintah dalam pengetasan kemiskinan di daerah Istimewa Yogyakarta”	Kemiskinan, kebijakan Pemerintah, daerah Istimewa Yogyakarta”	Deksritif-Analis dengan menganalisa data data sekunder yang relevan dan data ini bersifat kuantitatif	Hasil penelitian menemukan bahwa pemerintah DIY terus berupaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk miskin di daerahnya, tetapi karena keterbatasan dan ketidakberdayaan penduduk miskin itu sendiri sangat sulit untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, di samping keterbatasan fiskal daerah dalam menanggulangi kemiskinan penduduk di Indonesia
6.	Barika “Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, pengangguran dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera”	Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran dan Inflasi	Menggunakan pendekatan data Panel	Menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi tidak terlalu berpengaruh signifikan negatif dan pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera
7.	Khodijah “Peringkat Kesejahteraan Rumah tangga	Peringkat Kesejahteraan, Rumah tangga	Metode Survey	Pemerintah Indonesia memiliki beberapa model kesejahteraan dan kemiskinan, misalnya,

	nelayan yang dikepalai perempuan (Studi kasus Desa Malangrapat Kabupaten Bintan Kepulauan Riau”	nelayan, sumner daya lingkungan		badan pusat Statistik yang mengukur kemiskinan dengan fokus konsumsi dan badan koordinasi keluarga berencana normal(BKKBN) yang berfokus pada kesejahteraan keluarga
8.	Emmy Latifah “Harmonisasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia yang berporietasi pada Millenium development goals	Harmonisasi peraturan, kebijakan, pengentasan kemiskinan, millenium development	Data yang digunakan data sekunder dan primer dan penelitian hukum normatif	Komitmen Indonesia untuk mencapai MDGs mencerminkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan memberikan kontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia. Karena itu, deklarsi MDGs merupakan acuan penting dalam penyusunan Dokumen prencanaan pembangunan Nasinal. Pemerintah Indonesia telah mengarusutamakan MDgs dalam rencana pembangunan nasional.
9.	Multifah “ Telaah Kritis kebijakan penagnggulan kemiskinan dalamtinjauan konstitusi”	Penaggulangan Kemiskinan	Penelitian deskriptif	Kemiskinan merupakan penyakit kronis yang menjangkit hampir semua negara di dunia. Karena itu sudah banyak hal yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam rangka

				memutus lingkaran stan kemiskinan tersebut, yang harus diketahui dan dipelajari tingkat keberhasilannya.
10.	Aula Ahmad Hafids Saiful Fikri, Maimun Sholeh, Kiromin Baroroh “ Fenomena Kemiskinan perkotaan di Yogyakarta: Suatu Kajian Struktur dan respons kebijakan.	Kemiskinan kota, Struktur, respons kebijakan	Penelitian dekstritif yang bersifat eksploratif	Studi karakteristik kemiskinan perotaan ini dilakukan secara survey, dengan ulah responden yang diperoleh dengan menggunakan cluster purpose sampling sebanyak 121 rumah tangga miskin dikota Yogyakarta yang tinggal di daerah kumuh, bantaran kali dan pemukiman padat. Pemilihan sampling berdasarkan purpose sampling dengan kreteria seperti kepadatan penduduk, luas wilayah dan jumlah penduduk serta kantung kantung(kluter) kemiskinan.
11.	Rina Fitrianita Rizki, susiswo “ Analisis Faktor-faktor penyebab kemiskinan di provinsi Jawa Timur dengan	Kemiskinan, analisis faktor, eksploratori, komponen utama	Data sekunder dan data survey	Dihasilkan dau faktor yang terbnetuk, yaitu 1 atau faktor kelayakan perumahan dan faktor 2 atau faktor ekonomi rendah, faktor yang kelayakan perumahan terdiri atas variabel jenis atap

	metode Eksploratori Komponen utama”			rumah, jenis dinding rumah, jenis lantai rumah, dan luas lantai rumah, sedangkan faktor rendah terdiri atas variabel pendidikan, buta huruf dan pengangguran
12.	Sinnathurai Vijayakumar, Březinová Olga "Poverty Incidence and its Determinants in the Estate Sector of Sri Lanka"	Chronic Poverty, Education, Infrastructural development, Poverty Incidence, Plantation sector.	The Ordinary Least Square (OLS)	The national and regional poverty survey data and other official socio economic cross sectional data from selected provinces were used to analyze the extent of poverty in plantation sector in which 89 Divisional Secretariat from provinces such as Subaragamuva, Central and Uva were considered for the analysis
13.	Agustina Mega Puspitasari Putri "Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi jawa timur tahun 2008-2012"	Tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, PDRB per kapita, belanja publik.	regresi data panel	Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB per kapita terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan belanja publik berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

14.	Istiana Hermawati "Dampak program pengentasan kemiskinan di kabupaten jayapura"	dampak program, program pengentasan kemiskinan	teknik kuantitatif dan kualitatif	Hasil penelitian yaitu (1) subyek penelitian dalam kategori miskin karena memiliki penghasilan di bawah standar kebutuhan fisik minimum (KFM) Kabupaten Jayapura, (2) kontrak indikator kemiskinan lokal meliputi faktor ekonomi, sosial, psikis dan budaya, (3) Proses intervensi dan kualitas program untuk program keseluruhan terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap dampak program, (4). kontrak proses intervensi ditentukan oleh indikator engagement, assessment, designing, implementation, evaluation dan termination, (5). Program pengentasan kemiskinan berdampak secara signifikan terhadap peningkatan aspek ekonomi, sosial, psikis dan budaya dalam kehidupan subyek penelitian. di Kabupaten Jayapuraibandingkan program sektoral (KUBE
-----	--	--	-----------------------------------	--

15.	Ardi Anindita, Maslihatin Utami "Dampak pertumbuhan ekonomi, jumlah pengangguran dan kesejahteraan masyarakat terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten sidoarjo"	pertumbuhan ekonomi, jumlah pengangguran, kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan	pendekatan kuantitatif	terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi dan IPM memiliki pola hubungan berbanding terbalik dengan tingkat kemiskinan. Dalam hal ini peningkatan yang terjadi di kedua variabel tersebut akan memberikan dampak berupa penurunan tingkat kemiskinan. Sebaliknya, jumlah pengangguran memiliki pola hubungan yang berbanding lurus terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, setiap peningkatan yang terjadi pada variabel jumlah pengangguran akan memberikan dampak bagi peningkatan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo memiliki hubungan yang sangat kuat dengan tingkat kemiskinan. Hal ini sebagaimana terlihat dari nilai r sebesar $(-0,806)$. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo secara otomatis
-----	--	--	------------------------	--

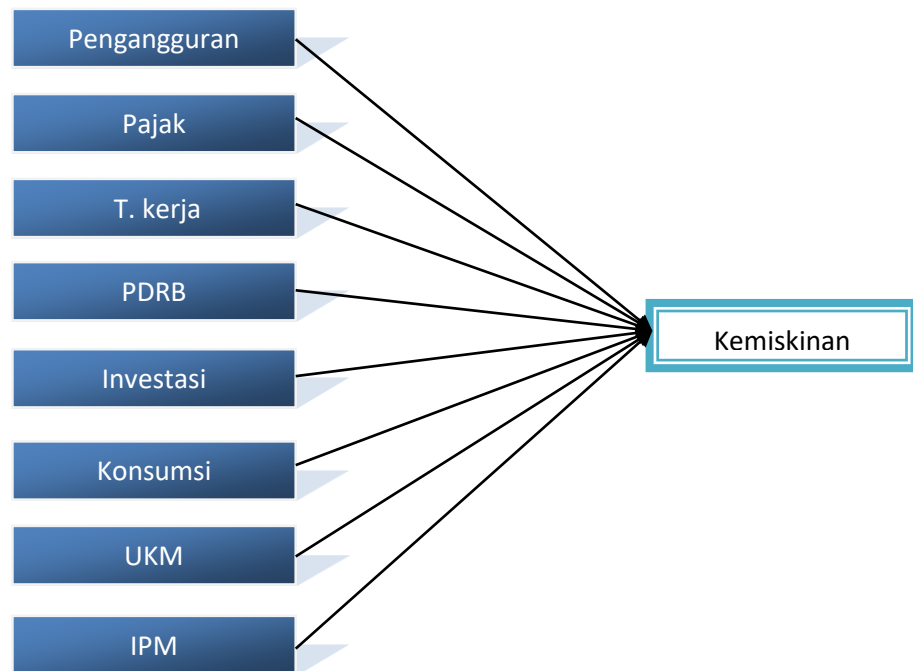
				<p>akan menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Kontribusi yang diberikan pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo sebesar 65%. Memperhatikan hal ini, maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu merumuskan sebuah kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Harapannya tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo dapat diturunkan secara signifikan</p>
16.	<p>Yesika Resiana Barimbing (2013)” Pengaruh PAD Tenaga Kerja, dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi bali”</p>	<p>Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Tenaga Kerja , Invetasi</p>	<p>Regresi linier berganda</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan PAD, tenaga kerja, dan investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Bali. Secara parsial PAD dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhansn ekonomi di provinsi di bali sedangkan</p>

				investasi tidak berpengaruh signifikan.
17.	Okta Ryan Pranatayudha (2013) “Pengaruh pertumbuhan ekonomi Upah minimum tingkat pengangguran terbuka dan infasi terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2009-2011	Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Upah minimum, Tingkat Pengangguran terbuka dan inflasi	Metode analisis regresi linier data panel dengan metode FEM	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variable pertumbuhan ekonomi berpengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan, upah minimum berpengaruh negative, dan signifikan terhadap kemiskinan, dan Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.
18.	Dewi Kurniawati Sunusi (2014) ”Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Pengeluaran pemerintah pada pertumbuhan ekonomi dan Dampaknya Terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara tahun 2001-2010”	Pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja, kemiskinan.	Path analysis	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable tenaga kerja, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah serta kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Khusus di Sulawesi Utara pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi dari setiap tahunnya.

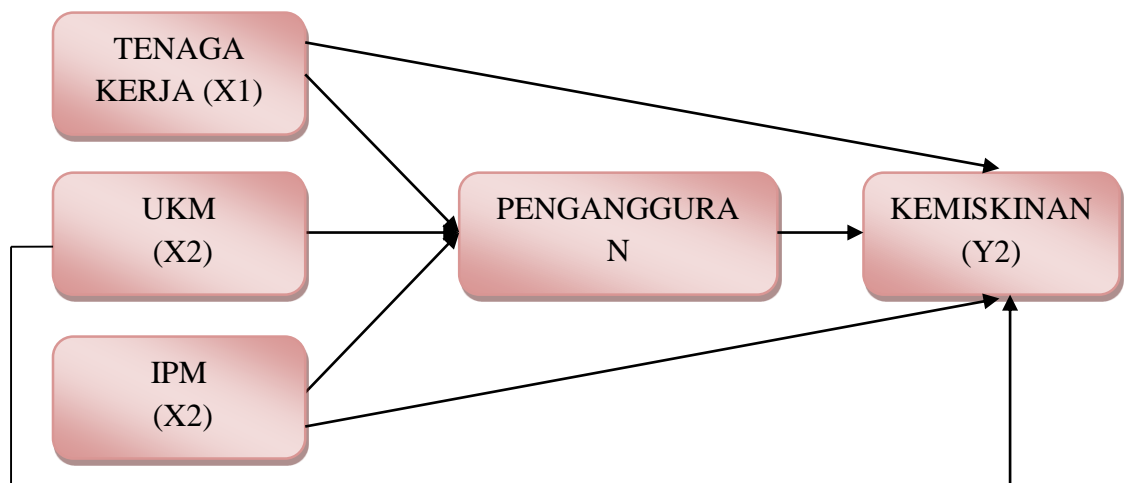
19.	Yoghi Citra Pratama(2014) “Analisis factor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia”	Pendapatn, Pendidikan, Inflasi, IPM,Konsumsi, Kemiskinan	Analisi regresi linier	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable pendapatan perkapita, infalsi, tingkat penidikan IPM, dan Konsumsi secara simultan mempengaruhi Variabel tingkat kemiskinan, hal ini dapat dilihat dari uji k yang menunjukkan tingkat signfkan <0,05. Dan dari R square sebesar 56% artinya sisanya sebesar 44% dijelaskan oleh variable lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
-----	---	--	------------------------	--

C. Kerangka Konseptual

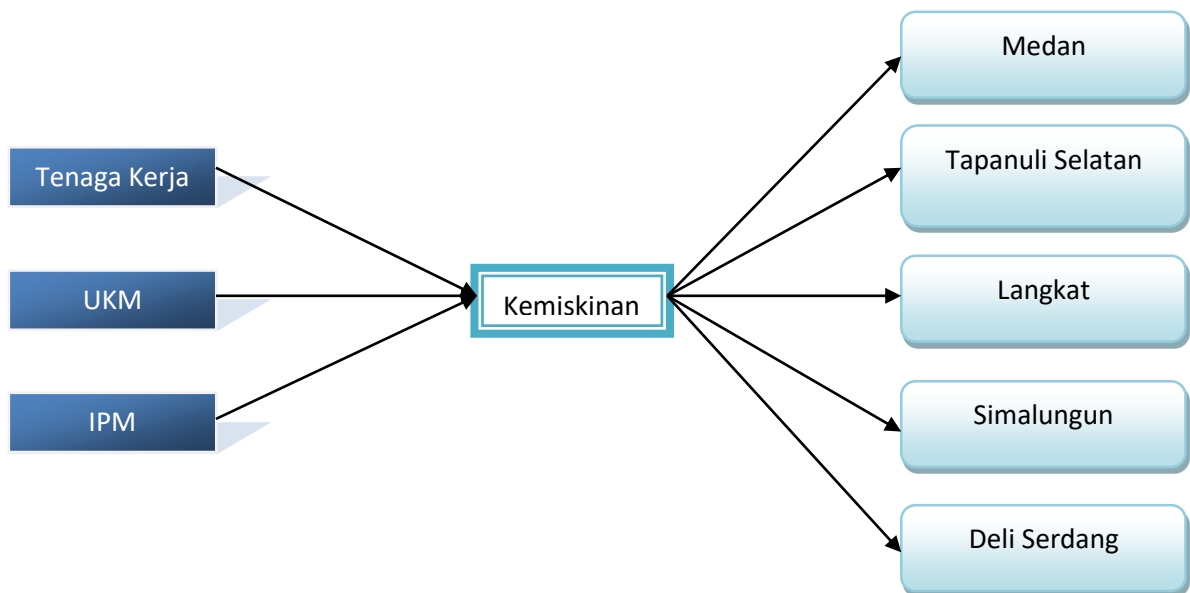
Dalam penelitian ada namanya kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah hubungan timbal balik antara satu variabel dengan variabel lainnya secara parsial maupun simultan.



Gambar 2.3 : Kerangka konseptual CFA



Gambar 2.4 : Kerangka konseptual Path Analysis



Gambar 2.5 : Kerangka konseptual Regresi Panel

D. Hipotesis

Teori empirik yang dikemukakan oleh Umar (2008) sebagai berikut :
Hipotesis adalah suatu proposisi, kondisi atau prinsip untuk sementara waktu dianggap benar dan barangkali tanpa keyakinan supaya bisa ditarik suatu konsekuensi logis dan dengan cara ini kemudian diadakan pengujian tentang kebenarannya dengan menggunakan data empiris hasil penelitian

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Semua Faktor-faktor (Pengangguran, Pajak, Jumlah tenaga Kerja, PDRB, Konsumsi, UMR, UKM, dan IPM) relevan mempengaruhi Pengangguran dan Kemiskinan di 5 Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Utara.
2. Faktor-faktor yang relevan tersebut berpengaruh signifikan terhadap Penganggran dan Kemiskinan di 5 Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian asosiatif/kuantitatif. Menurut Rusiadi (2013:14): Penelitian asosiatif/kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan dan pola/bentuk pengaruh antar dua variabel atau lebih, dimana dengan penelitian ini maka akan dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 5 Kabupaten/kota Di Provinsi Sumatera Utara mulai tahun 2013-2017. Waktu penelitian yang direncanakan mulai Februari 2019 sampai dengan Juni 2019 dengan rincian waktu sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

No	Aktivitas	Bulan/Tahun															
		Februari, 2019			Maret, 2019			April, 2019			Mei, 2019			Juni, 2019			
1	Riset awal/Pengajuan Judul	■	■	■													
2	Penyusunan Proposal				■	■	■	■	■								
3	Seminar Proposal								■								
4	Perbaikan Acc Proposal									■	■	■					
5	Pengolahan Data										■	■	■				
6	Penyusunan Skripsi											■	■	■	■		
7	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■
8	Meja Hijau																■

Sumber : penulis (2019)

C. Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan pada masalah dan hipotesis yang akan diuji, maka variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Definisi Operasional Variabel

NO	VARIABEL	DESKRIPSI	PENGUKURAN	SKALA
1	KEMISKINAN	Suatu keadaan atau ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan primer.	Pendapatan	Rasio
2	PENGANGGURAN	Jumlah orang yang masuk dalam angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaan.	Usia	Rasio
3	PAJAK	Iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan ,dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung.	Harga Konstan	Rasio
4	JUMLAH TENAGA KERJA	Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.	Waktu kerja	Rasio
5	KONSUMSI	Suatu kegiatan manusia yang menggunakan dan mengurangi daya guna suatu barang dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepuasan manusia, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus.	Barang yang digunakan	Rasio
6	PDRB	Jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian disuatu negara.	Pendapatan daerah	Rasio
7	INVESTASI	Pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi)	Investasi langsung	Rasio
8	UKM	Jenis usaha kecil dalam lajunya perekonomian negara.	Unit kerja baru	Rasio
9	IPM	Indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata-sederhana dari tiga indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, yaitu: Indeks Harapan Hidup,	Pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standart hidup untuk	Rasio

		Indeks Pendidikan, dan Indeks Standar Hidup Layak.	semua negara diseluruh dunia.	
--	--	--	-------------------------------	--

D. Jenis Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dan mengolah data dari informasi terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dan diolah BPS dari tahun 2013-2017 (5 Tahun).

F. Teknik Analisis Data

Model analisis dalam penelitian ini menggunakan model analisis data sebagai berikut :

1. Confirmatory Factor Analysis (CFA)

CFA bertujuan untuk menemukan suatu cara meringkas informasi yang ada dalam variabel asli (awal) menjadi satu set dimensi baru atau faktor dengan rumus :

$$X_i = B_{i1} F_1 + B_{i2} F_2 + B_{i3} F_3 + \dots + V_{ij}$$

Keterangan :

Kemiskinan = b1 Pengangguran + b2 Tax + b3 T. Kerja + b4 PDRB + b5
Investasi + b6 Konsumsi + b7 UKM + b8 IPM

X_i = Variabel ke-i yang dibakukan

B_{ij} = Koefisien regresi parsial untuk variabel i pada common factor ke-j

F_j	= Common factor ke-i
V_i	= Koefisien regresi yang dibakukan untuk variabel ke-i pada factor yang unik ke-i
μ_i	= Faktor unik variabel

2. Metode Analisis Jalur (Path Analysis)

Path Analysis atau analisis jalur digunakan untuk menganalisis pola hubungan diantara variable (Sani dan Maharani, 2013 : 74). Model ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel (endogen). Koefisien jalur adalah koefisien regresi yang distandarkan, yaitu koefisien regresi yang dihitung dari basis data yang telah riset dalam angka baku (Z-score). Analisis ini dibantu oleh bantuan software SPSS 16, dengan ketentuan uji F pada $\alpha = 0.05$ atau $p \leq 0,05$ sebagai taraf signifikan F (sig. F) sedangkan untuk uji T taraf signifikan $\alpha = 0,05$ atau $\leq 0,05$ yang dimunculkan kode (sig. T) dimana hal tersebut digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh tidak langsung dari variabel bebas terhadap variabel terkait.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Path Analysis (analisis jalur). Analisis jalur bertujuan untuk membuktikan hipotesis, yaitu membuktikan apakah pengangguran menjadi variabel utama dalam mempengaruhi kemiskinan yang dilihat dari tenaga kerja, UKM dan IPM, dengan persamaan sebagai berikut :

1. Persamaan Pertama

$$Y_1 = \beta_{Y_1 X_1} X_1 + \beta_{Y_1 X_2} X_2 + \beta_{Y_1 X_3} X_3 + \epsilon_1$$

2. Persamaan Kedua

$$Y_2 = \beta_{Y_2 X_1} X_1 + \beta_{Y_2 X_2} X_2 + \beta_{Y_2 X_3} X_3 + \beta_{Y_2 Y_1} Y_1 + \epsilon_2$$

Persamaan Aplikasi

1. Persamaan 1 $Y1 = \beta_{Y1X1} X1 + e$
2. Persamaan 2 $Y1 = \beta_{Y1X2} X2 + e$
3. Persamaan 3 $Y1 = \beta_{Y1X3} X3 + e$
4. Persamaan 4 $Y2 = \beta_{Y2X1} X1 + \beta_{Y2Y1} Y1 + e$
5. Persamaan 5 $Y2 = \beta_{Y2X2} X2 + \beta_{Y2Y1} Y1 + e$
6. Persamaan 6 $Y2 = \beta_{Y2X3} X3 + \beta_{Y2Y1} Y1 + e$

Keterangan :

- Y1 = Pengangguran
 Y2 = Kemiskinan
 X1 = Tenaga Kerja
 X2 = UKM
 X3 = IPM
 ϵ = *Error Term* / Tingkat Kesalahan

Analisis Jalur (PathAnalysis) didukung oleh uji mediasi. Uji Mediasi bertujuan untuk menguji apakah variabel intervening berfungsi sebagai mediasi atau perantara. Dengan syarat yaitu sebagai berikut:

- **$P1 < P2 \times P3$ atau pengaruh langsung < pengaruh tidak langsung maka H_a diterima**
- **$P1 > P2 \times P3$, atau pengaruh langsung > pengaruh tidak langsung maka H_a ditolak**

Untuk mengetahui kelayakan model analisis jalur, maka akan dilakukan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah hasil estimasi jalur yang dilakukan benar-benar layak digunakan atau tidak. Uji asumsi klasik yang digunakan, yaitu :

1. Uji Normalitas Data
2. Uji Multikolinieritas
3. Uji Autokorelasi

3. Regresi Panel

Dalam penelitian ini menggunakan data panel yaitu dengan menggunakan data antarwaktu dan data antardaerah. Regresi panel digunakan untuk mendapatkan hasil estimasi masing-masing karakteristik individu secara terpisah.

Pengujian Regresi Panel dengan rumus:

$$\text{Kemiskinan}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{T.Kerja}_{it} + \beta_2 \text{UKM}_{it} + \beta_3 \text{IPM}_{it}$$

Dimana:

Kemiskinan	: tingkat kemiskinan di 5 Kabupaten/Kota (%)
T. Kerja	: jumlah tenaga kerja di 5 Kabupaten/Kota (%)
UKM	: usaha kecil menengah di 5 Kabupaten/Kota (%)
IPM	: indeks pembangunan manusia di 5 Kabupaten/Kota (%)
ϵ	: <i>error term</i>
β	: koefisien regresi
α	: konstanta
i	: jumlah observasi
t	: banyaknya waktu

a. Model Efek Tetap (*Fixed Effect*)

Dasar pemikiran bahwa setiap individu observasi memiliki karakteristik masing-masing, maka model ini memungkinkan adanya *intercept* yang tidak konstan untuk tiap-tiap individu. Tetapi model ini memiliki kekurangan dimana tidak dihasilkan satu estimasi umum atau konstanta untuk mewakili seluruh individu.

b. Uji Chow (*Chow Test*)

Untuk mengetahui model *Pooled Least Square* (PLS) atau *Fixed Effect Model* (FEM) yang akan dipilih untuk estimasi data dapat dilakukan dengan uji F-test atau uji *Chow Test*. PLS adalah *restricted* model dimana ia menerapkan

intercept yang sama untuk seluruh individu. Seperti yang telah ketahui, terkadang asumsi bahwa setiap unit *cross section* memiliki perilaku yang sama cenderung tidak realistis mengingat dimungkinkan saja setiap unit *cross section* memiliki perilaku yang berbeda. Untuk itu dipergunakan *Chow Test*. Dasar penolakan terhadap hipotesa nol tersebut adalah dengan menggunakan F Statistik seperti yang dirumuskan oleh Chow sebagai berikut :

$$CHOW = \frac{(RSS - URSS) / (N - 1)}{URSS / (NT - N - K)}$$

Dimana :

RRSS = *Restricted Residual Sum Square* (merupakan *Sum of Square Residual* yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode *pooled least square/common intercept*).

URSS = *Unrestricted Residual Sum Square* (merupakan *Sum of Square Residual* yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode *fixed effect*).

N = Jumlah data *cross section* (5 Kabupaten/Kota)

T = Jumlah data *time series* (5 tahun)

K = Jumlah variabel penjelas (3)

Pengujian ini mengikuti distribusi F statistik yaitu FN-1, NT-N-K

Jika nilai *CHOW Statistics* (F Stat) hasil pengujian lebih besar dari F Tabel, maka cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap hipotesa nol sehingga model yang akan digunakan adalah model *fixed effect*, begitu juga sebaliknya.

c. Hausman Test

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan apakah model fixed effect atau random effect yang dipilih. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut:

H_0 : Model Random Effect

H_1 : Model Fixed Effect

Dasar penolakan H_0 adalah dengan menggunakan pertimbangan statistik Chi Square. Jika Chi Square statistik $>$ Chi Square table maka H_0 ditolak (model yang digunakan adalah Fixed Effect), dan sebaliknya.

Menurut Judge ada empat pertimbangan pokok untuk memilih FEM dan REM, yaitu:

1. Jika jumlah *time series* (T) besar dan jumlah *cross section* (N) kecil maka nilai taksiran parameter berbeda kecil, sehingga pilihan didasarkan pada kemudahan perhitungan, yaitu FEM.
2. Bila N besar dan T kecil penaksiran dengan FEM dan REM menghasilkan perbedaan yang signifikan. Pada REM diketahui bahwa $\beta_{0i} = \beta_0 + e_i$, dimana e_i adalah komponen acak *cross section*, pada FEM diperlakukan β_0 adalah tetap atau tidak acak. Bila diyakini bahwa individu atau *cross section* (20

kabupaten/kota) tidak acak maka FEM lebih tepat, sebaliknya jika *cross section* acak maka REM lebih tepat.

3. Jika komponen *error* e_i individu berkorelasi (serial korelasi) maka penaksir REM adalah bias dan penaksir FEM tidak bias.
4. Jika N besar dan T kecil serta asumsi REM dipenuhi maka penaksir REM lebih efisien dari penaksir FEM (Manurung, Manurung dan Saragih, 2005).

Penetapan model yang digunakan, apakah Efek Tetap (*Fixed Effect*) didasarkan pada uji Hausman (*Hausman's test of specification model*) yang mengikuti distribusi X^2 . Hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 : Estimator random konsisten

H_1 : Estimator random tidak konsisten

$X^2_{hit} < X^2_{tab}$ artinya H_0 diterima,

$X^2_{hit} > X^2_{tab}$ artinya H_0 ditolak.

Nilai X^2 hit atau nilai Hausman (H) diperoleh dari perbedaan nilai koefisien dan kovarian antara kedua metode. Rumusan statistik uji Hausman adalah sebagai berikut (Greene, 2000):

$$H = (\beta_{FE} - \beta_{RE})' [\text{COV}(\beta_{FE}) - \text{COV}(\beta_{RE})]^{-1} (\beta_{FE} - \beta_{RE})$$

Di mana:

β_{FE} = Matriks koefisien estimator dari model Efek Tetap

$\text{COV}(\beta_{FE})$ = Matriks kovarian koefisien estimator dari model Efek Tetap

Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi *chi-square* dengan *degree of freedom* sebanyak k , di mana k adalah jumlah variabel bebas. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya, maka model yang tepat adalah Efek Tetap. Demikian pula sebaliknya jika nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya, maka model yang tepat adalah model Efek Random. Selanjutnya, pengolahan data sekunder dan penerapan ketiga metode di atas akan menggunakan program (*software*) statistik Eviews.

d. Uji Kesesuaian (*Test Goodness of Fit*)

Estimasi terhadap model dilakukan dengan menggunakan metode yang tersedia pada program statistik Eviews versi 5.1. Koefisien yang dihasilkan dapat dilihat pada out put regresi berdasarkan data yang di analisis untuk kemudian diinterpretasikan serta dilihat signifikansi tiap-tiap variabel yang diteliti.

- 1) R^2 (koefisien determinasi) bertujuan untuk mengetahui kekuatan variabel bebas (*independent variable*) menjelaskan variabel terikat (*dependent variabel*).
- 2) Uji serempak (F-test), dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi statistik koefisien regresi secara serempak. Jika $F_{hit} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
- 3) Uji parsial (t-test), dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi statistik koefisien regresi secara parsial. Jika $t_{hit} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Perkembangan Perekonomian 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara (Medan, Tapanuli Selatan, Langkat, Simalungun dan Deli Serdang)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan yang naik 0,02% Tahun Anggaran 2019, membuat Pemerintah Kota (Pemko) Medan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 6,5% pada tahun depan. Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kota Medan Syaiful Bahri mengatakan, Jumat (19/10), proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Medan juga tidak muluk-muluk. Artinya, disesuaikan dengan penambahan anggaran belanja daerah tahun depan. Pada 2018 pertumbuhan ekonomi Kota Medan diproyeksikan 6,3 persen. Artinya naiknya juga hanya 0,2 persen juga. Sesuai dengan kenaikan APBD Kota Medan tahun anggaran 2019 yang diproyeksikan Rp 5,96 triliun. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi dilihat dari pembangunan kota yang meliputi inflasi yang diproyeksikan tumbuh menjadi 4,04% pada 2019. Inflasi pada 2018 Kota Medan diprediksi 4,36%. Selain itu, lanjutnya, juga indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi itu, kata mantan Sekretaris Daerah Kota Medan itu, akan berdampak terhadap kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan, Pemko Medan mencatat tingkat pengangguran pada 2018 di Kota Medan sebesar 8,25%. Jumlah penduduknya 2,9 juta jiwa dengan jumlah penduduk miskin 8,12%. Pada 2019, katanya, Pemko Medan menargetkan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 7,2%, serta penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 7,76% dengan asumsi jumlah

penduduk Kota Medan 2,9 juta jiwa. Pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Medan (Unimed) Muhammad Ishak mengatakan, peningkatan anggaran belanja yang hanya 0,02% bukanlah menjadi penghalang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang baik pada tahun depan. Menurutnya, Pemko Medan tetap menjalankan pekerjaan sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat. Pekerjaan yang dibuat, katanya, tentunya haruslah bersentuhan dengan masyarakat. "Pekerjaan yang dilakukan haruslah bersentuhan dengan kepentingan publik. Misalnya perbaikan infrastruktur seperti jalan, drainase. Apalagi saat ini masyarakat mengeluhkan banjir," ujarnya. Jadi, katanya, dengan anggaran belanja seadanya Pemko Medan bisa membuat kebijakan perencanaan pembangunan berskala prioritas. "Mana yang jadi prioritas kebutuhan masyarakat terlebih dahulu didahulukan. Misalnya banjir. Jangan membuat kotanya indah, tapi banjir," pungkasnya. (www.medanbisnisdaily.com)

Merosotnya harga produksi pertanian dan melemahnya rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) pastinya telah mempengaruhi melemahnya daya beli masyarakat. Dan secara umum pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Angka kemiskinan yang diharapkan dapat ditekan namun dengan kondisi ini pesimis dapat terwujud. Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mengeluh dengan kondisi harga karet yang masih di bawah Rp 5.000/kg demikian juga dengan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang hanya berada di kisaran Rp 550/kg. Lapangan pekerjaan yang mulai sulit akibat perusahaan mulai keluhkan tingginya biaya produksi usahanya. Data dari BPS Tapsel, jumlah penduduk miskin di Tapsel tahun 2013 bertambah 0,23% bila dibandingkan tahun 2012 sebesar 11,10% dari jumlah penduduk 268.900 pada Tahun 2012. Kasi

Statistik Sosial, Saip Iskandar Hasibuan mengatakan, kategori miskin yang dimaksud berdasarkan pengeluaran standar yang harus dipenuhi setiap orang/jiwa dalam memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, yang masing-masing standar kebutuhan minimum kabupaten/kota di Sumut berbeda. "Untuk Kabupaten Tapsel kebutuhan minimum Rp 288.154 per jiwa per bulan, dan berdasarkan standar tersebut, sebanyak 30.800 jiwa dari 268.900 jumlah penduduk dikategorikan berada di garis kemiskinan," kata Saip seraya menambahkan pendataan yang dilakukan BPS dengan mengambil sampel secara random (acak) di 14 kecamatan di Tapsel. (www.medanbisnisdaily.com)

Perekonomian Langkat tahun 2017 jika dibandingkan tahun sebelumnya tumbuh sebesar 5,05 persen. Berdasarkan pendekatan produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 10,70 persen. Diikuti oleh Lapangan Usaha informasi dan komunikasi sebesar 9,85 persen dan Lapangan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 7,92 persen. Berdasarkan pendekatan pengeluaran, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 6,04 persen, disusul komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 4,51 persen dan konsumsi pemerintah sebesar 2,86 persen. Tiga lapangan usaha yang memberi peran dominan terhadap PDRB Langkat pada tahun 2017 yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 39,42 persen, industri pengolahan sebesar 16,24 persen serta perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 10,86 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) memberi kontribusi terbesar yaitu sebesar 59,73 persen, menyusul komponen ekspor barang dan jasa sebesar 53,55 persen dan

komponen impor sebesar 47,61 persen. Secara nominal, PDRB Langkat tahun 2017 atas dasar harga berlaku mencapai Rp37.023,33 milyar dan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp26.823,48 milyar. (<https://langkatkab.bps.go.id>)

Kegiatan sosial perusahaan perusahaan bubur kertas PT. Toba Pulp Lestari, Tbk (TPL) di kabupaten Simalungun membangkitkan perekonomian masyarakat sekitar perusahaan. Dana Miliaran Rupiah digelontorkan tpl melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) dengan berbagai program untuk membantu masyarakat. Desa Dolok Saribu kecamatan Pondok Buluh kabupaten Simalungun, salah satu desa terapan dari dana CSR perusahaan, yang berhasil melakukan peningkatan ekonomi masyarakat. Beragam pembangunan desa termasuk infrastruktur jalan memberi akses perubahan peningkatan perekonomian warga lokal. "Saya akui kehadiran tpl sangat bermanfaat bagi warga desa kami. mulai dari pembuatan jalan akses desa, bedah rumah, pipanisasi air bersih sangat membangun desa kami" ujar Kasper Manik salah seorang warga desa. "Saya yang dulunya memiliki rumah beralaskan tanah kini sudah memiliki rumah layak huni dan air bersih, semua berkat TPL," tambah Kasper. Desa Dolok Saribu berjarak ± 1 km dari areal kerja dan konsesi HTI (Hutan Tanaman Industri) TPL sektor Aek Nauli. Tercatat ada belasan kepala keluarga dari puluhan masyarakat yang hidup dan menetap didesa ini. Rata-rata pendapatan perekonomian warga adalah bertani jagung, dan kopi. Namun sebagian lagi memiliki usaha kecil yang selama ini adalah mitra kerja TPL. "Selain bantuan dari tpl yang rutin diberikan kepada masyarakat, kami juga ada yang bekerja diperusahaan bubur kayu ini. Kami benar merasa keberadaan perusahaan sungguh bermanfaat bagi kehidupan masyarakat desa kami," tutur Sardi Sinaga salah seorang warga desa Dolok Saribu. Kegiatan

sosial dan dukungan terhadap masyarakat yang berdekatan dengan aktivitas perusahaan, juga dilakukan di desa Nagori Dolok kecamatan Pondok Buluh, Kabupaten Simalungun. Akses jalan pedesaan yang dibangun TPL atas dasar kepentingan bersama, sangat bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat setempat. Bahkan saat ini infrastruktur jalan di desa Nagori Dolok sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda empat. Harmoko Marbun salah seorang warga menerangkan banyak manfaat hadirnya perusahaan dilokasi pedesaan. Selain berputarnya prekonomian warga melalui pembangunan jalan, keberadaan perusahaan juga memberikan peluang ekonomi baru bagi anak dan cucu. "Saya tidak harus memuji, tetapi memang sejak ada TPL selaku perusahaan bubuk kertas aktivitas masyarakat sangat jauh berbeda dalam hal bertambahnya ekonomi dan kondisi jalan yang baik. Apalagi sebelumnya masyarakat cuma berjalan kaki untuk melintasi desa lainnya", terang Harmoko Marbun. Sedikitnya puluhan masyarakat hidup dan tinggal bersama keluarga mereka di desa Nagori Dolok ini. Peran serta TPL dalam komitmen hidup bersama masyarakat juga terwujud dalam dukungan pendidikan bagi anak-anak pedesaan. Salah seorang warga Pungkas Sitanggung menyebutkan, saat ini sedikitnya ada 2 orang anak menerima beasiswa dari TPL untuk mengemban pendidikan di perguruan tinggi. "Banyak manfaat dari TPL ini, anak saya dapat beasiswa masuk perguruan tinggi, kalau didesa kami ini ada 2 orang anak yang menerima beasiswa. Nilainya Rp 5 juta pertahun setiap anak. Kalau dari hasil pendapatan kami agak sulit lah membiayai anak keperguruan tinggi", sebut Pungkas Sitanggung.

Sementara itu tercatat ada beberapa kegiatan CSR PT. Toba Pulp Lestari, Tbk di kabupaten Simalungun, salah satunya berupa pipanisasi air bersih di desa

Naga Hulambu. Kegiatan ini bahkan menerima penghargaan tertinggi oleh Agung Laksono selaku menteri koordinator kesejahteraan rakyat (menko kesra)di tahun 2012 silam. "Perusahaan berkomitmen untuk membantu masyarakat dan pembangunan daerah melalui program CSR, perusahaan komit untuk hal ini. Hingga saat ini total CSR kita di kabupaten Simalungun telah mencapai Rp 7 Milyard Rupiah dan terus bertambah setiap tahunnya.," ujar Jasmin Parhusip Senior Manager TPL (25/01/2017). (www.tobapulp.com)

Wakil Bupati Deli Serdang, Sumatera Utara, Zainuddin Mars mengatakan pertumbuhan ekonomi kabupaten itu sejak awal periode tahun 2009 hingga 2013 rata-rata mencapai 5,99 persen dengan pendapatan per kapita masyarakat sebesar Rp22,31 juta lebih per tahun. "Meski demikian tuntutan kebutuhan pembangunan masih banyak, bahkan akan semakin kompleks ke depan," katanya, pada sidang paripurna istimewa DPRD Deli Serdang dalam rangka peringatan Hari jadi ke-67 Kabupaten Deli Serdang, di Lubuk Pakam, Senin. Menurut dia berbagai program pembangunan telah berhasil dilakukan untuk percepatan pembangunan Deli Serdang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun semua pihak hendaknya tidak boleh berpuas diri dengan keberhasilan tersebut. Bahkan ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bergandengan tangan, bahu membahu membangun Deli Serdang agar lebih maju lagi. Dikatakannya, tiga pilar kekuatan pembangunan yang telah terlaksana dengan baik, yakni pemerintah, partisipasi masyarakat dan dukungan swasta, harus terus digalakkan dan ditumbuhkembangkan sehingga percepatan pembangunan Deli Serdang dapat terpacu guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Mari terus kita lanjutkan pembangunan di Deli Serdang, karena diakui masih ada program-program yang

belum tercapai. Ini adalah tugas kita bersama, bagaimana kedepan kita bisa bersama-sama meningkatkan kemajuan yang telah dicapai selama ini," katanya. Zainuddin menambahkan, pengoperasian Kuala Namu International Airport (KNIA) yang diperkirakan sekitar Agustus 2013, diharapkan akan menjadikan Deli Serdang menuju sebuah kekuatan baru, khususnya pada bidang ekonomi, industri dan perdagangan.(KR-JRD)(<https://sumut.antaranews.com>)

2. Hasil Uji CFA (*Confirmatory Factor Analysis*)

a. Hasil Analisa Data *Confirmatory Factor Analysis* (CFA)

Untuk menganalisis data hasil penelitian maka peneliti melakukan dan menerapkan metode analisis kuantitatif yaitu dengan mengolah data kemudian diinterpretasikan sehingga akan diperoleh gambaran yang sebenarnya tentang masalah yang diteliti. Selanjutnya dilakukan analisis faktor yang bertujuan untuk menemukan suatu cara meringkas informasi yang ada dalam variabel asli (awal) menjadi satu set dimensi baru atau variabel (faktor). Pengolahan data menggunakan program SPSS, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.1 KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	.483
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square	183.989
df	28
Sig.	.000

Metode yang digunakan dalam analisis faktor ini yaitu metode Komponen Utama. Dari tabel KMO and Bartlett's Test, didapat nilai Kaiser Mayer Olkin (KMO) sebesar 0,483 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,5. Nilai ini menandakan data belum valid untuk dianalisis lebih lanjut dengan Analisis faktor.

Nilai uji Barlett sebesar 183,989 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 di bawah 5%, maka matriks korelasi yang terbentuk merupakan matriks identitas, atau dengan kata lain model faktor yang digunakan sudah baik.

Selanjutnya untuk melihat variabel mana yang memiliki nilai communalities correlation di atas atau di bawah 0,5 atau diatas 50% dapat dilihat pada tabel communalities berikut ini.

Tabel 4.2 Communalities

	Initial	Extraction
PENGANGGURAN	1.000	.697
TAX	1.000	.855
TENAGA KERJA	1.000	.973
PDRB	1.000	.752
INVESTASI	1.000	.961
KONSUMSI	1.000	.396
UKM	1.000	.830
IPM	1.000	.715

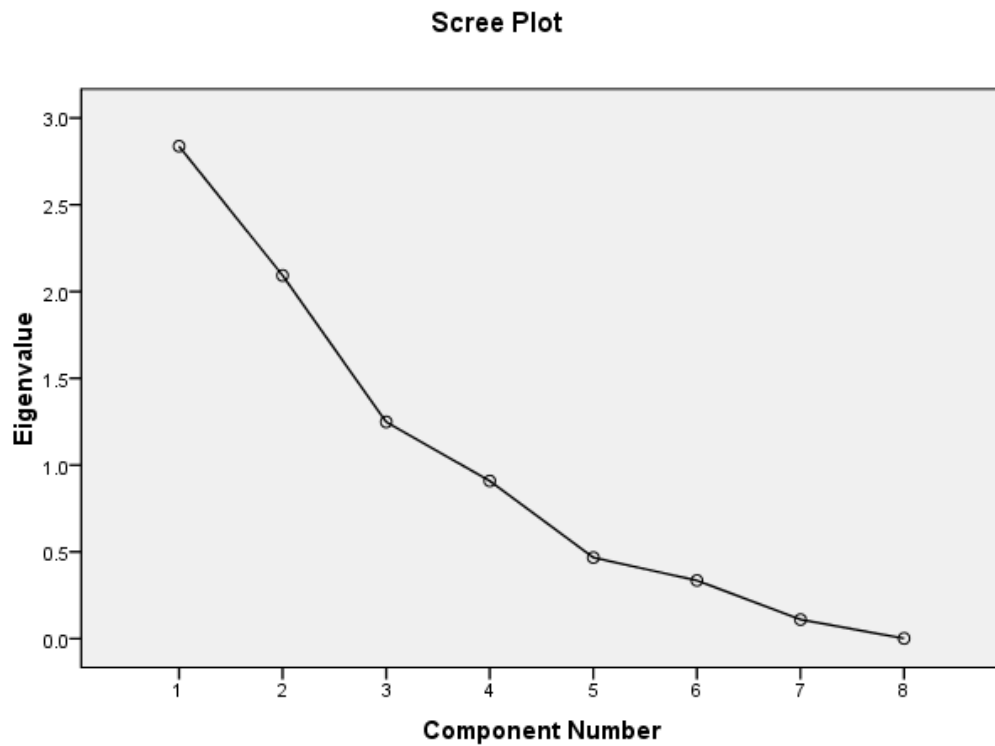
Extraction Method: Principal Component Analysis.

Hasil analisis data menunjukkan semakin besar communalities sebuah variabel, berarti semakin erat hubungannya dengan faktor yang terbentuk. Tabel communalities menunjukkan hasil extraction secara individu terdapat sebelas variabel yang memiliki kontribusi yang melebihi 0,5 atau 50% yaitu Pengangguran, Tax, Tenaga Kerja, PDRB, Investasi, UKM dan IPM, sedangkan variabel Konsumsi memiliki nilai extraction dibawah 0,5 atau 50%. Namun kelayakan selanjutnya harus diujidengan variance Explained.

Tabel 4.3 Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
	1	2.837	35.466	35.466	2.837	35.466	35.466	2.589	32.359
2	2.093	26.157	61.622	2.093	26.157	61.622	2.242	28.022	60.381
3	1.249	15.607	77.229	1.249	15.607	77.229	1.348	16.848	77.229
4	.909	11.358	88.587						
5	.467	5.840	94.428						
6	.335	4.187	98.614						
7	.110	1.372	99.986						
8	.001	.014	100.000						

Berdasarkan hasil total variance explained pada tabel initial Eigenvalues, diketahui bahwa hanya ada 3 komponen variabel yang menjadi factor penelitian Kemiskinan di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara. Eigenvalues menunjukkan kepentingan relative masing-masing faktor dalam menghitung varians ke 12 variabel yang dianalisis. Dari tabel diatas terlihat bahwa hanya ada tiga faktor yang terbentuk. Karena ke tiga faktor memiliki nilai total angka eigenvalues diatas 1 yakni, sebesar 2,837 untuk faktor satu, 2,093 untuk faktor dua dan 1,249 untuk faktor tiga. Hal ini menunjukkan bahwa tiga faktor adalah paling bagus untuk meringkas delapan variabel tersebut, sehingga proses factoring berhenti pada 3 faktor saja yang akan ikut dalam analisis selanjutnya.



Gambar 4.1 Scree Plot

Dari gambar scree plot diatas terlihat bahwa dari factor 1 ke 2 dan ke 3 arah grafik menurun dengan cukup tajam, pada factor 3 ke 5 dan ke 4 dapat dilihat juga bahwa grafik tersebut masih menurun dan pada factor ke 6 dilihat bahwa grafik kembali meningkat sedikit. Sedangkan dari factor 7 ke 8 grafik kembali menurun. Dari factor 4 ke 8 sudah dibawah angka 1 dari sumbu Y (Eigenvalues). Hal ini menunjukkan bahwa 3 faktor adalah paling bagus untuk meringkas ke 8 variabel tersebut.

Tabel 4.4 Component Matrix^a

	Component		
	1	2	3
PENGANGGURAN	.062	-.701	.449
TAX	-.770	.496	-.127
TENAGA KERJA	.882	.441	-.025
PDRB	.387	.589	.505
INVESTASI	.888	.413	-.042
KONSUMSI	.065	.055	-.624
UKM	.555	-.714	.109
IPM	-.461	.359	.611

Setelah diketahui bahwa tiga faktor adalah jumlah yang paling optimal, maka dapat dilihat dalam tabel Component Matrix menunjukkan distribusi dari delapan variabel tersebut pada tiga faktor yang terbentuk. Sedangkan angka-angka yang ada pada tabel tersebut adalah factor loadings, yang menunjukkan besar korelasi antar suatu variabel dengan faktor 1, faktor 2, dan faktor 3. Proses penentuan variabel mana akan masuk ke faktor yang mana, dilakukan dengan melakukan perbandingan besar korelasi pada setiap baris. Pada tabel component matrix menunjukkan korelasi diatas 0,5. pada faktor 1 adalah variabel tenaga kerja, Investasi, Konsumsi dan UKM (Usaha Kecil Menengah). Pada faktor 2 yaitu variabel Tax dan PDRB. Pada faktor 3 yaitu variable Pengangguran dan IPM.

Selanjutnya melakukan proses faktor rotation terhadap faktor yang terbentuk. Tujuan rotasi untuk memperjelas variabel yang masuk ke dalam faktor tertentu.

Tabel 4.5 Rotated Component Matrix^a

	Component		
	1	2	3
PENGANGGURAN	-.303	.717	.301
TAX	-.366	-.840	.129
TENAGA KERJA	.971	.100	-.144
PDRB	.695	-.143	.498
INVESTASI	.959	.121	-.166
KONSUMSI	.028	-.172	-.605
UKM	.064	.899	-.135
IPM	-.121	-.375	.748

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 5 iterations.

Component Matrix hasil proses rotasi (Rotated Component Matrix) memperlihatkan distribusi variabel yang lebih jelas dan nyata. Terlihat bahwa faktor loading yang dulunya kecil semakin kecil dan faktor loading yang besar semakin di perbesar.

Berdasarkan hasil nilai component matrix diketahui bahwa dari delapan faktor, maka yang layak untuk mempengaruhi kemiskinan di 5 Kabupaten/Kota adalah tiga faktor yang berasal dari:

- Komponen 1 terbesar : Tenaga Kerja
- Komponen 2 terbesar : UKM
- Komponen 3 terbesar : IPM

Setelah dilakukan Uji CFA dan diperoleh hasil bahwa ada 3 variabel yang relevan dalam Kemiskinan di 5 Kabupaten/Kota yaitu Tenaga Kerja, UKM dan

IPM. Sehingga model persamaan Path Analysis dalam penelitian ini di rumuskan sebagai berikut :

1. Persamaan Pertama

$$Y1 = PY1 X1 + PY1 X2 + PY1 X3 + \epsilon_1$$

2. Persamaan Kedua

$$Y2 = PY2 X1 + PY2 X2 + PY2 X3 + PY2 Y1 + \epsilon_2$$

Dimana :

Y1 = Pengangguran

Y2 = Penduduk Miskin

X1 = Tenaga Kerja

X2 = UKM

X3 = IPM

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

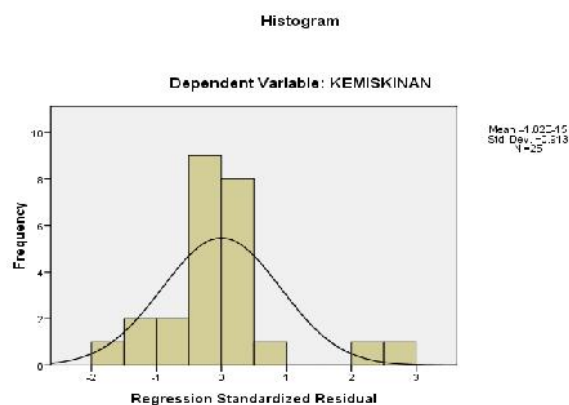
e = Error Term

3. Hasil Uji Analisis Jalur (*Path Analysis*)

a. Uji Asumsi Klasik

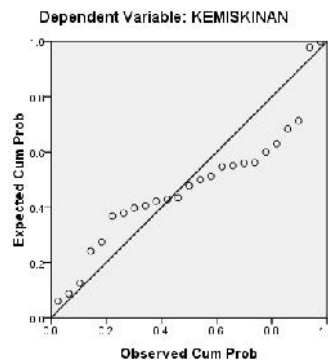
1) Uji Normalitas Data

Dalam penelitian ini pengujian normalitas dideteksi melalui analisa grafik histogram dan normal P-P Plot yang dihasilkan SPSS sebagai berikut:



Gambar 4.2 Histogram Kemiskinan

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

**Gambar 4.3 P-Plot Kemiskinan**

Dari hasil analisis diatas terlihat bahwa gambar histogram memiliki kecembungan seimbang ditengah. kemudian gambar normal P-Plot terlihat titik-titik berada tidak jauh atau masih disekitaran pada garis diagonal. Dengan demikian maka data dinyatakan normal.

2) Uji Autokorelasi

Dalam penelitian ini pengujian multikolinieritas dideteksi melalui analisa nilai Durbin Watson yang dihasilkan SPSS sebagai berikut:

Tabel 4.6 Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Durbin-Watson
1	.682 ^a	.465	.359	1.637

a. Predictors: (Constant), PENGANGGURAN, IPM, tenaga kerja, UKM

b. Dependent Variable: KEMISKINAN

Hasil uji autokolerasi diatas menyatakan bahwa nilai Durbim Watson berada diantara 1 sampai 3 yaitu sebesar 1.637 dengan demikian maka data dinyatakan lulus autokolerasi. Maka data valid dan dapat dilakukan anlisis selanjutnya

b. Hasil Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan Melalui Pengangguran

Persamaan 1 $Y_1 = PY_1X_1 + e$

Tabel 4.7 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.232 ^a	.054	.013	3.25061

a. Predictors: (Constant), TENAGA KERJA

Tabel 4.8 Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.409	7.055		2.184	.039
	TENAGA KERJA	-.115	.100	-.232	-1.145	.264

Persamaan 4 $Y_2 = PY_2X_1 + PY_2Y_1 + e$

Tabel 4.9 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.454 ^a	.206	.134	.25685

a. Predictors: (Constant), PENGANGGURAN, TENAGA KERJA

Tabel 4.10 Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.307	.613		.502	.621
	TENAGA KERJA	.019	.008	.466	2.385	.026
	PENGANGGURAN	.011	.016	.128	.658	.518

a. Dependent Variable: KEMISKINAN

1) Interpretasi Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan Melalui Pengangguran Sebagai Variabel Intervening

Untuk mengetahui adanya pengaruh tenaga kerja melalui pengangguran terhadap kemiskinan digunakan analisis jalur (*path analys*). Besarnya nilai error pada masing-masing pengaruh variabel independen terhadap dependen di dapat melalui perhitungan sebagai berikut:

$$Pe_1 = \sqrt{1 - 0,232^2} = 0,972$$

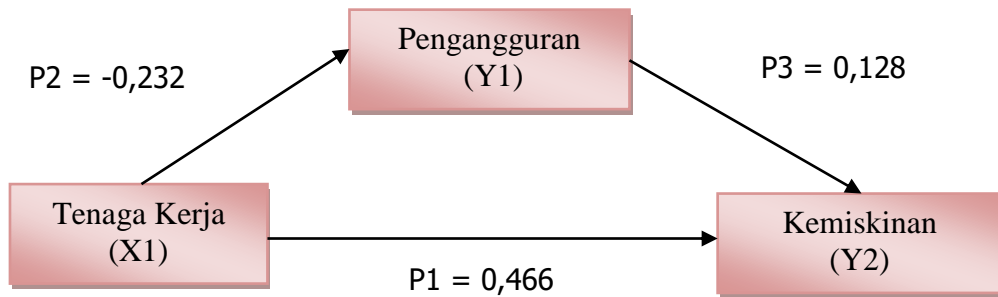
$$Pe_2 = \sqrt{1 - 0,454^2} = 0,891$$

Dalam teori trimming pengujian validitas model riset diamati melalui perhitungan koefisien determinasi total sebagai berikut:

$$\begin{aligned} R^2_m &= 1 - P^2e_1 \cdot P^2e_2 \\ &= 1 - (0.972)^2 (0.891)^2 \\ &= 1 - (0.944) (0.793) \\ &= 0.25 \text{ atau } 25.0\% \end{aligned}$$

Nilai koefisien dterminasi sebesar 25% menunjukkan bahwa sebesar 25% informasi yang terkandung dalam data dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya sebesar 75% dijelaskan oleh error dan variabel lain diluar model.

Selanjutnya penjelasan mengenai pengaruh langsung dan tidak langsung yang dilihat dari nilai *standardized coefficient regresi* masing-masing variabel independen terhadap dependen yaitu sebagai berikut:



Gambar 4.4: Pengaruh Antara Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan Melalui Pengangguran

Berdasarkan gambar di atas, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa tenaga kerja dapat berpengaruh langsung terhadap kemiskinan dan dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu dari pengaruh tenaga kerja ke pengangguran (sebagai variabel intervening) lalu ke kemiskinan.

- Besarnya pengaruh **langsung** tenaga kerja terhadap kemiskinan (P_1) = 0,466
- Besar pengaruh **tidak langsung** tenaga kerja terhadap kemiskinan melalui pengangguran yaitu ($P_2 \times P_3$) (-0.232×0.128) = -0.029
- Besarnya pengaruh **total sebagai pengaruh mediasi** tenaga kerja terhadap kemiskinan melalui pengangguran (pengaruh langsung + pengaruh tidak langsung) = $0.466 + (-0.029) = 0.437$.
- Kesimpulan: nilai **total sebagai pengaruh mediasi** lebih kecil dari nilai pengaruh **langsung** namun lebih besar dari nilai pengaruh **tidak langsung**.

Hasil perhitungan yang didapat menunjukkan :

Nilai pengaruh langsung (P_1) = 0,466 lebih besar dari nilai pengaruh tidak langsung ($P_2 \times P_3$) = 0,437 maka H_a ditolak. artinya Tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan melalui pengangguran sebagai

variabel intervening. Atau dapat disimpulkan bahwa pengangguran tidak dapat dijadikan variabel yang memediasi/intervening antara tenaga kerja terhadap kemiskinan di 5 Kb/Kota Sumatera Utara. Maka pengangguran tidak berfungsi sebagai variabel intervening.

c. Hasil UKM Terhadap Kemiskinan Melalui Pengangguran

$$\text{Persamaan 2 } Y1 = PY1X2 + e$$

Tabel 4.11 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.942 ^a	.888	.883	1.11924

a. Predictors: (Constant), UKM

Tabel 4.12 Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-7.488	1.123		-6.666	.000
	UKM	7.740	.574	.942	13.493	.000

a. Dependent Variable: PENGANGGURAN

$$\text{Persamaan 5 } Y2 = PY2X2 + PY2Y1 + e$$

Tabel 4.13 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.036 ^a	.001	-.089	.28803

a. Predictors: (Constant), PENGANGGURAN, UKM

Tabel 4.14 Coefficientsa

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.803	.495		3.642	.001
	UKM	-.062	.441	-.090	-.141	.889
	PENGANGGURAN	.009	.054	.105	.165	.871

a. Dependent Variable: KEMISKINAN

1) Interpretasi UKM Terhadap Kemiskinan Melalui Pengangguran

Sebagai Variabel Intervening

Untuk mengetahui adanya pengaruh UKM melalui pengangguran terhadap kemiskinan digunakan analisis jalur (*path analys*). Besarnya nilai error pada masing-masing pengaruh variabel independen terhadap dependen di dapat melalui perhitungan sebagai berikut:

$$Pe_1 = \sqrt{1 - 0,942^2} = 0.112$$

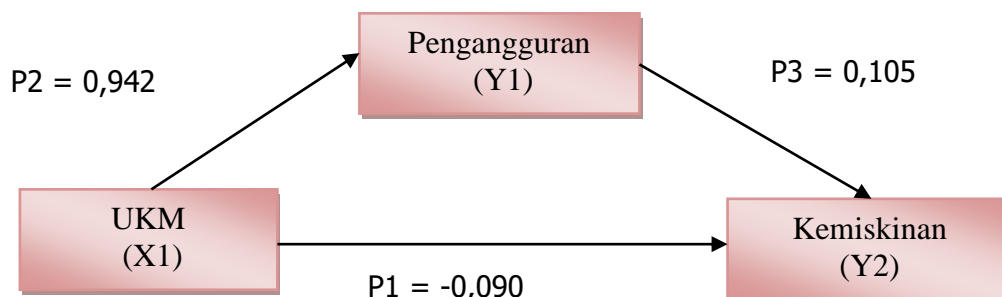
$$Pe_2 = \sqrt{1 - 0,036^2} = 0.998$$

Dalam teori trimming pengujian validitas model riset diamati melalui perhitungan koefisien determinasi total sebagai berikut:

$$\begin{aligned} R^2_m &= 1 - P^2e_1.P^2e_2 \\ &= 1 - (0.112)^2(0.998)^2 \\ &= 1 - (0.012) (0.996) \Rightarrow 0.98 \text{ atau } 98.0\% \end{aligned}$$

Nilai koefisien determinasi sebesar 98% menunjukkan bahwa sebesar 98% informasi yang terkandung dalam data dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya sebesar 2% dijelaskan oleh error dan variabel lain diluar model.

Selanjutnya penjelasan mengenai pengaruh langsung dan tidak langsung yang dilihat dari nilai standardized coefficient regresi masing-masing variabel independen terhadap dependen yaitu sebagai berikut:



Gambar 4.5: Pengaruh Antara UKM Terhadap Kemiskinan Melalui Pengangguran

Berdasarkan gambar di atas, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa UKM (Usaha Kecil Menengah) dapat berpengaruh langsung terhadap kemiskinan dan dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu dari pengaruh UKM ke pengangguran (sebagai variabel intervening) lalu ke kemiskinan.

- Besarnya pengaruh **langsung** UKM terhadap kemiskinan (P1) = -0.090
- Besar pengaruh **tidak langsung** UKM terhadap kemiskinan melalui pengangguran yaitu (P₂ x P₃) (0.942 x 0.105) = 0.098
- Besarnya pengaruh **total sebagai pengaruh mediasi** UKM terhadap kemiskinan melalui pengangguran (pengaruh langsung + pengaruh tidak langsung) = -0.090 + 0.098 = 0.008.
- Kesimpulan: nilai **total sebagai pengaruh mediasi** lebih besar dari nilai pengaruh **langsung** dan lebih kecil dari nilai pengaruh **tidak langsung**.

Hasil perhitungan yang didapat menunjukkan :

Nilai pengaruh langsung (P1) = -0.090 lebih kecil dari nilai pengaruh tidak langsung (P2 x P3) = 0.098 maka H_a diterima. artinya UKM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan melalui pengangguran sebagai variabel intervening. Atau dapat disimpulkan bahwa pengangguran dapat dijadikan variabel yang memediasi/intervening antara UKM terhadap kemiskinan di 5 Kab/Kota Sumatera Utara. Maka pengangguran berfungsi sebagai variabel intervening.

d. Hasil IPM Terhadap Kemiskinan Melalui Pengangguran

Persamaan 3 $Y_1 = PY_1X_3 + e$

Tabel 4.15 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.023 ^a	.001	-.043	3.34113

a. Predictors: (Constant), IPM

Tabel 4.16 Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.345	.690		10.648	.000
	IPM	5.326E-5	.000	.023	.110	.913

a. Dependent Variable: PENGANGGURAN

Persamaan 6 $Y_2 = \beta_2 X_3 + \beta_2 Y_1 + e$

Tabel 4.17 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.356 ^a	.127	.047	.26932

a. Predictors: (Constant), PENGANGGURAN, IPM

Tabel 4.18 Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.716	.135		12.677	.000
	IPM	6.944E-5	.000	.356	1.785	.088
	PENGANGGURAN	.001	.017	.012	.060	.952

a. Dependent Variable: KEMISKINAN

1) Interpretasi IPM Terhadap Kemiskinan Melalui Pengangguran

Sebagai Variabel Intervening

Untuk mengetahui adanya pengaruh UKM melalui pengangguran terhadap kemiskinan digunakan analisis jalur (*path analys*). Besarnya nilai error pada masing-masing pengaruh variabel independen terhadap dependen di dapat melalui perhitungan sebagai berikut:

$$Pe_1 = \sqrt{1 - 0,023^2} = 0.999$$

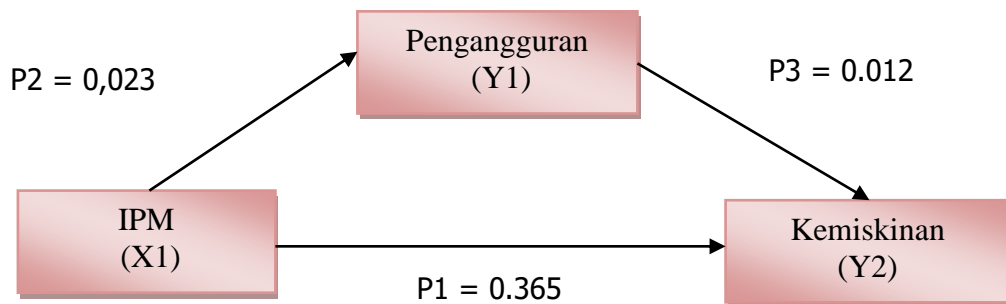
$$Pe_2 = \sqrt{1 - 0,356^2} = 0.873$$

Dalam teori trimming pengujian validitas model riset diamati melalui perhitungan koefisien determinasi total sebagai berikut:

$$\begin{aligned} R^2_m &= 1 - P^2_{e_1} \cdot P^2_{e_2} \\ &= 1 - (0.999)^2 (0.873)^2 \\ &= 1 - (0.998) (0.762) \\ &= 0.23 \text{ atau } 23.0\% \end{aligned}$$

Nilai koefisien dterminasi sebesar 23% menunjukkan bahwa sebesar 23% informasi yang terkandung dalam data dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya sebesar 77% dijelaskan oleh error dan variabel lain diluar model.

Selanjutnya penjelasan mengenai pengaruh langsung dan tidak langsung yang dilihat dari nilai standardized coefficient regresi masing-masing variabel independen terhadap dependen yaitu sebagai berikut:



Gambar 4.6: Pengaruh Antara IPM Terhadap Kemiskinan Melalui Pengangguran

Berdasarkan gambar di atas, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dapat berpengaruh langsung terhadap kemiskinan dan dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu dari pengaruh IPM ke pengangguran (sebagai variabel intervening) lalu ke kemiskinan.

- Besarnya pengaruh **langsung** IPM terhadap kemiskinan (P_1) = 0.365
- Besar pengaruh **tidak langsung** IPM terhadap kemiskinan melalui pengangguran yaitu ($P_2 \times P_3$) ($0,023 \times 0.012$) = 0.0002
- Besarnya pengaruh **total sebagai pengaruh mediasi** UKM terhadap kemiskinan melalui pengangguran (pengaruh langsung + pengaruh tidak langsung) = $0.365 + 0.0002 = 0.3652$.

- Kesimpulan: nilai **total sebagai pengaruh mediasi** lebih besar dari nilai pengaruh **langsung** dan nilai pengaruh **tidak langsung**.

Hasil perhitungan yang didapat menunjukkan :

Nilai pengaruh langsung (P1) = 0.365 lebih besar dari nilai pengaruh tidak langsung (P2 x P3) = 0.0002 maka H_0 ditolak artinya IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan melalui pengangguran sebagai variabel intervening. Atau dapat disimpulkan bahwa pengangguran tidak dapat dijadikan variabel yang memediasi/intervening antara IPM terhadap kemiskinan di 5 Kab/Kota Sumatera Utara. Maka pengangguran tidak berfungsi sebagai variabel intervening.

4. Hasil Uji Regresi Panel

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode estimasi *pooled least square* dengan *common intercept*, dengan menggunakan software eviews, didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.19 hasil estimasi dengan *pooled least square*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.392887	0.643274	-0.610761	0.5479
X1	0.026169	0.007410	3.531354	0.0020
X2	0.140561	0.119972	1.171618	0.2545
X3	9.66E-05	3.25E-05	2.971768	0.0073
R-squared	0.452207	Mean dependent var		1.748400
Adjusted R-squared	0.373951	S.D. dependent var		0.275948
S.E. of regression	0.218339	Akaike info criterion		-0.059889
Sum squared resid	1.001111	Schwarz criterion		0.135132
Log likelihood	4.748607	Hannan-Quinn criter.		-0.005798
F-statistic	5.778558	Durbin-Watson stat		1.474215
Prob(F-statistic)	0.004815			

Berdasarkan hasil estimasi dengan *pooled least square* dengan *common intercept*, memberikan hasil estimasi, R^2 yang dihasilkan dari estimasi persamaan dalam penelitian ini sebesar 45,22 % selama masa periode pengamatan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan metode analisis *pooled least square* dengan *common intercept*, variasi variabel independent dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan sebesar 45,22% variasi variabel dependent yaitu Kemiskinan, sementara sisanya sebesar 54,78% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam model penelitian.

Selanjutnya penulis mengestimasi data penelitian dengan menggunakan estimasi *pooled least square* dengan *Fixed Effect Methode*.

Tabel 4.20 Hasil Estimasi Pooled Least Square Dengan Fixed Effect Model

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 05/24/19 Time: 12:36				
Sample: 2013 2017				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 5				
Total panel (balanced) observations: 25				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.250229	0.821324	-2.739757	0.0140
X1	0.055356	0.010626	5.209378	0.0001
X2	0.043817	0.161618	0.271112	0.7896
X3	7.89E-05	2.90E-05	2.718898	0.0146
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.690893	Mean dependent var	1.748400	
Adjusted R-squared	0.563613	S.D. dependent var	0.275948	
S.E. of regression	0.182290	Akaike info criterion	-0.312097	
Sum squared resid	0.564904	Schwarz criterion	0.077943	
Log likelihood	11.90122	Hannan-Quinn criter.	-0.203917	
F-statistic	5.428158	Durbin-Watson stat	1.875947	
Prob(F-statistic)	0.002083			

Menurut hasil estimasi persamaan dengan menggunakan *Fixed Effect Methode* untuk Kemiskinan diperoleh R^2 sebesar 69,08% sementara sisanya

sebesar 30,92% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam model penelitian. Dari hasil ini dapat berarti keseluruhan variabel bebas yang tercakup dalam persamaan cukup mampu untuk menjelaskan variasi Kemiskinan di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara.

Hasil dengan menggunakan *Fixed Effect Methode* memberikan gambaran hasil yang lebih baik secara statistik dibandingkan dengan menggunakan *Pooled least square* dengan *common intercept*. Namun untuk menentukan pilihan estimasi yang digunakan, penulis melakukan uji Chow. Hasil uji ini diharapkan dapat diketahui pilihan yang lebih tepat antara *Pooled Least square* dengan *Common Intercept* atau *pooled Least square* dengan *Fixed Effect Methode*.

Hasil uji Chow yang dilakukan dengan formulasi sebagai berikut :

Tabel 4.21 Hasil Uji Chow

Model	RSS _{PLS}	RSS _{FEM}	F _{stat}	F _{tabel}	Ho diterima/ditolak
KEMISKI NAN	1.001111	0.564904	N=5 T = 5 k = 3 F = 5.42	F(0,05) = 19.00	Ho ditolak Efek Individu

Sumber : Pengolahan data,2019

Rumus uji Chow sebagai berikut :

$$CHOW = \frac{(RSS_{R} - URSS) / (N-1)}{URSS / (NT - N - K)}$$

Dimana :

RRSS = *Restricted Residual Sum Square* (merupakan *Sum of Square Residual* yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode *pooled least square/common intercept*).

URSS = *Unrestricted Residual Sum Square* (merupakan *Sum of Square Residual* yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode *fixed effect*).

N = Jumlah data *cross section* (5 Kabupaten/Kota)

T = Jumlah data *time series* (5 tahun)

K = Jumlah variabel penjelas (empat)

$$Chow = \frac{(1.001111 - 0.564904) / 5 - 1}{0.564904 / (5 \times 5 - 5 - 3)}$$

$$Chow = \frac{0.436207 / 4}{0.564904 / 17}$$

$$Chow = \frac{0.10905175}{0.0332296471}$$

$$= 3.28$$

Hasil pengujian untuk Inflasi memberikan hasil F hitung 3,28 > F-tabel (19,00) H0 diterima atau Ha ditolak, sehingga hasil tersebut dapat menggunakan *pooled least square* karena pada model tersebut terdapat efek individu yang artinya masing-masing individu (Medan, Tapanuli Selatan, Langkat, Simalungun dan Deli Serdang) mempunyai *intercept* sendiri.

Berdasarkan hasil uji Chow diketahui bahwa model PLS dapat digunakan sehingga menggunakan asumsi data FEM atau REM. Menurut Judge dalam (Manurung, 2005), ada empat pertimbangan pokok untuk memilih FEM dan REM, yaitu :

1. Jika jumlah *time series* (T) besar dan jumlah *cross section* (N) kecil maka nilai taksiran parameter berbeda kecil, sehingga pilihan didasarkan pada kemudahan perhitungan, yaitu FEM.

2. Bila N besar dan T kecil penaksiran dengan FEM dan REM menghasilkan perbedaan yang signifikan. Pada REM diketahui bahwa $b_{0i} = b_0 + \varepsilon_i$, dimana ε_i adalah komponen acak cross section, pada FEM diperlakukan b_0 adalah tetap atau tidak acak. Bila diyakini bahwa individu atau *cross section* tidak acak maka FEM lebih tepat, sebaliknya jika *cross section* acak maka REM lebih tepat
3. Jika komponen error ε_i individu berkorelasi maka penaksir REM adalah bias dan penaksir FEM tidak bias.
4. Jika N besar dan T kecil serta asumsi REM dipenuhi maka penaksir REM lebih efisien dari penaksir FEM .

Berdasarkan pendapat Judge asumsi penelitian $N=5=T=5$ maka model yang dipakai adalah model *Fixed Effect Model*. Berdasarkan hasil ini maka penulis menyimpulkan bahwa tehnik estimasi yang lebih baik untuk digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *pooled least square* dengan *Fixed Effect Model*. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengolahan data dengan menggunakan *Panel Data Regression Model* dengan metode *Generalized Least Squares (GLS)* dan *unweighted statistics* serta menggunakan *white heteroscedasticity-consistent standard errors and covariance* untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin muncul dalam pengolahan data antara lain adanya masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi. Analisis panel data ini digunakan karena data-data yang akan diolah merupakan *cross section observation* dan *pooling of time series* yang diperoleh dan diteliti sejalan dengan perjalanan waktu. Model panel data ini memiliki ruang dan dimensi waktu sehingga estimasi variabel dan hasil perhitungan akan memberikan analisis

empirik yang lebih luas. Dari data yang diperoleh dan dikumpulkan, panel yang terjadi pada penelitian ini adalah *balanced panel* (panel seimbang) dimana setiap unit *cross section* memiliki jumlah observasi *time series* yang sama. Untuk mengestimasi model dan proses penghitungan, pada penelitian ini akan digunakan dua pendekatan dari model regresi panel data yaitu pendekatan *Fixed Effect*.

B. PEMBAHASAN

1. Pembahasan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA)

Hasil analisa pada CFA menunjukkan bahwa dari tabel KMO and Bartlett's test, didapat nilai Kaiser Mayer Olkim (KMO) sebesar 0,483 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,5. Nilai ini menandakan data belum valid untuk di analisis lebih lanjut dengan analisis faktor. Nilai uji Bartlett sebesar 183,989 dengan nilai signifikan sebesar 0.000 di bawah 5%. Maka matriks korelasi yang terbentuk dibawah 5%. Maka matriks korelasi yang terbentuk merupakan matriks identitas.

Selanjutnya untuk melihat variabel mana yang memiliki nilai communalities correlation diatas atau dibawah 0,5 atau diatas 50% dapat dilihat pada tabel communalities bahwa hasil analisis data menunjukkan semakin besar communalities sebuah variabel, berarti semakin erat hubungannya dengan faktor yang terbentuk. Tabel communalities menunjukkan hasil extraction secara individu terdapat sebelas variabel yang memiliki kontribusi yang melebihi 0,5 atau 50% yaitu yaitu Pengangguran, Tax, Tenaga Kerja, PDRB, Investasi, UKM dan IPM, sedangkan variabel Konsumsi memiliki nilai ectraction dibawah 0,5 atau 50%. Namun kelayakan selanjutnya harus di uji dengan variance Explained.

Hasil total variance explained diketahui hanya ada 5 komponen variabel yang menjadi penduduk miskin di 5 kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara.

Dari tabel variance Explained terlihat bahwa hanya ada 3 faktor yang terbentuk. Karena ketiga faktor memiliki nilai total angka eigenvalues diatas 1 yaitu sebesar 2,837 untuk faktor satu, 2,093 untuk faktor dua dan 1,249 untuk faktor tiga. Sehingga proses factoring berhenti pada 3 faktor saja yang akan ikut dalam analisis selanjutnya. Selanjutnya grafik scree plot menunjukkan bahwa dari factor 1 ke 2 dan ke 3 arah grafik menurun dengan cukup tajam, pada factor 3 ke 5 dan ke 4 dapat dilihat juga bahwa grafik tersebut masih menurun dan pada factor ke 6 dilihat bahwa grafik kembali meningkat sedikit. Sedangkan dari factor 7 ke 8 grafik kembali menurun. Dari factor 4 ke 8 sudah dibawah angka 1 dari sumbu Y (Eigenvalues). Hal ini menunjukkan bahwa 3 faktor adalah paling bagus untuk meringkas ke 8 variabel tersebut.

Setelah diketahui bahwa tiga faktor adalah jumlah yang paling optimal, maka dapat dilihat dalam tabel component matrix menunjukkan distribusi dari delapan variabel tersebut pada tiga faktor yang terbentuk. Lalu dapat dilihat pada tabel component matrix menunjukkan korelasi diatas 0,5 pada faktor 1 adalah variabel tenaga kerja, Investasi, Konsumsi dan UKM (Usaha Kecil Menengah). Pada faktor 2 yaitu variabel Tax dan PDRB. Pada faktor 3 yaitu variable Pengangguran dan IPM. Selanjutnya melakukan faktor rotation terhadap faktor yang terbentuk. Tujuan rotasi untuk memperjelas variabel yang masuk kedalam faktor tertentu.

Berdasarkan hasil nilai component matrix diketahui bahwa dari delapan faktor, maka yang layak untuk mempengaruhi penduduk miskin adalah tiga faktor

yang berasal dari komponen 1 terbesar yaitu Tenaga Kerja, komponen 2 terbesar yaitu UKM, dan komponen terbesar 3 terbesar yaitu IPM. Sehingga model persamaan Path Analysis dapat dilakukan.

2. Pembahasan Analisis Jalur (*Path Analysis*)

a. Analisis Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan Melalui Pengangguran Sebagai Variabel Intervening

Hasil analisis data menunjukkan pengaruh langsung tenaga kerja terhadap kemiskinan sebesar 0,466 lebih besar dari nilai pengaruh tidak langsung yaitu tenaga kerja terhadap kemiskinan melalui pengangguran sebesar 0,437 maka H_0 ditolak. artinya tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan melalui pengangguran sebagai variabel intervening di 5 Kab/Kota Sumatera Utara. Atau dapat disimpulkan bahwa pengangguran tidak dapat dijadikan variabel yang memediasi/intervening antara tenaga kerja terhadap kemiskinan. Maka pengangguran tidak berfungsi sebagai variabel intervening.

Hal ini sesuai dengan penelitian Putu (2014) yang menyatakan bahwa tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Bali. Ia menyatakan bahwasannya tidak selamanya jika tenaga kerja meningkat maka akan disertai dengan penurunan kemiskinan. Hal ini disebabkan karena jika terjadi peningkatan produktivitas yang pada akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan pendapatan, belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok yang harganya juga akan meningkat, sehingga peningkatan produktivitas tidak akan menurunkan jumlah penduduk miskin. Selain itu kenaikan produktivitas tidak selalu menaikkan standard hidup riil masyarakat apabila peningkatan

produktivitas tersebut tidak disertai dengan peningkatan konsumsi. Dengan adanya peningkatan konsumsi, maka akan banyak permintaan dan perusahaan akan menambah jumlah produksi, bertambah jumlah produksi maka akan meningkatkan faktor produksi lainnya seperti tenaga kerja. Peningkatan produktivitas tidak disertai peningkatan konsumsi disebabkan oleh beberapa hal, misalnya masyarakat yang lebih memilih untuk meningkatkan tabungan mereka.

b. Analisis Pengaruh UKM Terhadap Kemiskinan Melalui Pengangguran Sebagai Variabel Intervening

Hasil analisis data menunjukkan pengaruh langsung UKM terhadap kemiskinan sebesar -0.090 lebih kecil dari nilai pengaruh tidak langsung yaitu UKM terhadap kemiskinan melalui pengangguran sebesar 0.098 maka Ha diterima. artinya UKM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan melalui pengangguran sebagai variabel intervening. Atau dapat disimpulkan bahwa pengangguran dapat dijadikan variabel yang memediasi/intervening antara UKM terhadap kemiskinan di 5 Kab/Kota Sumatera Utara. Maka pengangguran berfungsi sebagai variabel intervening.

Jika terjadi peningkatan pada Usaha Kecil Menengah maka akan banyak usaha yang berkembang itu artinya akan membuka lapangan pekerjaan baru, dan akhirnya pengangguran berkurang. Apabila seseorang tidak menganggur atau memiliki pekerjaan berarti ia memiliki pendapatan untuk bisa memenuhi kebutuhannya, maka itu artinya dia sudah terbebas dari masalah kemiskinan. Dengan begitu jika terjadi peningkatan terhadap UKM maka pengangguran berkurang dan menurunkan angka penduduk miskin.

Menurut Erwan 2007 bahwa UKM memiliki peranan yang bisa dikembangkan sebagai salah satu potensi penciptaan lapangan pekerjaan bagi penduduk miskin. Beberapa hal berikut menjelaskan keunggulan-keunggulan UKM dalam mengatasi kemiskinan yaitu:

- Struktur industri di Indonesia didominasi oleh UKM yang merupakan industri padat karya
- UKM makin relevan ketika sebagian besar penduduk miskin berpendidikan rendah. UKM sangat penting untuk mengatasi pengangguran karena dapat memberikan kesempatan kerja bagi kelompok miskin yang tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi sehingga sulit untuk memperoleh akses pekerjaan di industri besar. Hal ini karena tenaga kerja yang diperlukan oleh industri kecil tidak menuntut pendidikan formal tertentu T. Tambunan 2000. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja yang diperlukan industri kecil didasarkan pada pengalaman yang terkait factor historis. Hal ini sering ditemui pada industri kerajinan, ukir, batik.
- Aspek lokasi. Beberapa studi menunjukkan bahwa sebagian besar UKM berada di pedesaan. Kemunculan UKM di pedesaan ini tidak terlepas dari perubahan dektor pertanian di pedesaan yang menyebabkan peluang kerja di sector pertanian semakin menyempit dari waktu ke waktu. Tekanan yang terus-menerus disektor pertanian ini menyebabkan orang-orang yang tadinya bekerja disektor pertanian harus mencari alternatif baru untuk mendapatkan pekerjaan disektor non pertanian Purwanto, 2005. Dalam kondisi tersebut maka UKM menjadi instrument untuk bertahan bagi mereka yang terdesak keluar dari sector pertanian. Karena industri kecil yang berlokasi dipedesaan

tidak memerlukan infrastruktur dan modal yang besar, seperti pada industri besar.

- Aspek permodalan. UKM tidak memerlukan modal yang besar karena menggunakan system borongan. Dengan system tersebut maka para buruh mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan dengan alat yang mereka miliki sendiri-sendiri.
- Aspek Ketahanan. UKM memiliki ketahanan yang lebih baik disbanding dengan industry besar, karena lebih fleksibel dalam menghadapi guncangan disbanding industry besar. Hal ini disebabkan karena UKM tidak memerlukan modal yang besar, menggunakan bahan baku local yang murah, menggunakan tenaga kerja rumah tangga, menjual produk mereka untuk pasar domestik Tambunan 2004.
- Besarnya kontribusi UKM terhadap nilai tambah dan PDB. UKM memiliki kontribusi yang cukup besar pada PDB. Hasil penelitian AKATIGA menyatakan bahwa tahun 2002-2003 kontribusi Usaha Kecil terhadap pembentukan PDB mengalami peningkatan.

c. Analisis Pengaruh IPM Terhadap Kemiskinan Melalui Pengangguran Sebagai Variabel Intervening

Hasil analisis data menunjukkan bahwa pengaruh langsung IPM terhadap kemiskinan sebesar 0.365 lebih besar dari nilai pengaruh tidak langsung yaitu IPM terhadap kemiskinan melalui pengangguran sebesar 0.0002 maka H_0 ditolak, artinya IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan melalui pengangguran sebagai variabel intervening. Atau dapat disimpulkan bahwa pengangguran tidak dapat dijadikan variabel yang memediasi/intervening antara

IPM terhadap kemiskinan. Maka pengangguran tidak berfungsi sebagai variabel intervening. Hal ini berarti hubungan IPM terhadap kemiskinan lebih signifikan jika secara langsung, tanpa harus melalui pengangguran.

Menurut Lubis N. (2017) kualitas sumber daya manusia dapat menjadi factor penyebab utama terjadinya kemiskinan. Kualitas sumber daya dapat dilihat dari Indeks pembangunan Manusia. IPM bermanfaat untuk membandingkan kinerja pembangunan manusia baik antar Negara atau antardaerah. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indicator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Dengan masyarakat yang sehat dan berpendidikan baik, peningkatan produktivitas atau sumber daya manusianya juga akan meningkat, dan disertai dengan peningkatan konsumsi, ketika pengeluaran konsumsi meningkat, maka tingkat kemiskinan akan menurun. Disisi lain, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia berakibat pada rendahnya produktivitas berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin (Sukmaraga, 2011).

Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Sukmawati (2018) yang menyatakan bahwa pengangguran dapat menjadi mediasi atau variabel intervening antara IPM dan kemiskinan di Indonesia. Hal ini berarti jika terjadi peningkatan IPM, misalnya peningkatan pendidikan, peningkatan sumber daya manusia maka akan mengurangi pengangguran, berkurangnya pengangguran maka akan menurunkan angka penduduk miskin. Begitupun sebaliknya, jika terjadi penurunan pada IPM yang salah satunya dilihat dari pendidikan atau

sumber daya manusia yang berkualitas, maka akan meningkatkan pengangguran dan akan meningkatkan angka kemiskinan.

3. Pembahasan Regresi Panel

a. Koefisien Regresi Tenaga Kerja

Nilai koefisien regresi Tenaga Kerja adalah sebesar 0,055 hal ini dapat diartikan apabila terjadi perubahan pada Tenaga Kerja sebesar 1% maka akan terjadi peningkatan Kemiskinan sebesar 0,055% dengan arah yang sama. Namun nilai prob t statistic $0,0001 < 0,05$ pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha=5\%$) sehingga dinyatakan pengaruh Tenaga Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan. Kesimpulan hasil ini juga dapat terlihat bahwa pengaruh Tenaga Kerja terhadap Kemiskinan 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara bersifat elastis. Artinya dampak perubahan dari Tenaga Kerja terhadap Kemiskinan cukup besar. Tenaga kerja yang rendah merupakan salah satu sumber penyebab kemiskinan. Artinya, kemiskinan tidak semata-mata disebabkan oleh pengangguran saja (Profan Ali, 2009). Banyak keluarga miskin yang memiliki pendapatan, bahkan pendapatan tetap namun masuk dalam kategori miskin karena pendapatan mereka sangat rendah yang dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas kerja mereka. Maka dari itulah selain faktor pendapatan, faktor produktivitas tenaga kerja juga sangat relevan dalam mempengaruhi kemiskinan. Hasil serupa juga dijumpai pada penelitian yang dilaksanakan oleh Melly (2010) yang menyatakan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif terhadap kemiskinan masyarakat.

b. Koefisien Regresi UKM

Nilai koefisien regresi UKM (Usaha Kecil Menengah) adalah sebesar 0,043 hal ini dapat diartikan apabila terjadi perubahan pada UKM (Usaha Kecil Menengah) sebesar 1% maka akan terjadi peningkatan Kemiskinan sebesar 0,043% dengan arah yang sama. Namun nilai prob t statistic $0,789 > 0,05$ pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha=5\%$) sehingga dinyatakan pengaruh UKM (Usaha Kecil Menengah) tidak signifikan terhadap Kemiskinan. Kesimpulan hasil ini juga dapat terlihat bahwa pengaruh UKM (Usaha Kecil Menengah) terhadap Kemiskinan 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara bersifat in-elastis. Artinya dampak perubahan dari UKM (Usaha Kecil Menengah) terhadap Kemiskinan tidak terlalu besar. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian milik Supriyanto (2016) yang menyatakan bahwa pengentasan kemiskinan dengan cara mengembangkan UKM memiliki potensi yang cukup baik. Sektor UKM memiliki kontribusi yang besar bagi penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja. Meskipun demikian kontribusinya terhadap PDB masih sekitar 30%. Upaya untuk memajukan sektor UKM tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya. Pengembangan UKM akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

c. Koefisien Regresi IPM

Nilai koefisien regresi IPM (Indeks Pembangunan Manusia) adalah sebesar 7,89 hal ini dapat diartikan apabila terjadi perubahan pada IPM (Indeks Pembangunan Manusia) sebesar 1% maka akan terjadi peningkatan Kemiskinan sebesar 7,89% dengan arah yang sama. Namun nilai prob t statistic $0,01 < 0,05$

pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha=5\%$) sehingga dinyatakan pengaruh IPM (Indeks Pembangunan Manusia) berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan. Kesimpulan hasil ini juga dapat terlihat bahwa pengaruh IPM (Indeks Pembangunan Manusia) terhadap Kemiskinan 5 Kabupaten/Kota di Sumatra Utara bersifat elastis. Artinya dampak perubahan dari IPM (Indeks Pembangunan Manusia) terhadap Kemiskinan cukup besar.

Todaro (2006) menyatakan bahwa IPM menggambarkan indeks pengembangan manusia yang dilihat dari sisi perluasan, pemerataan, dan keadilan baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan masyarakat. Rendahnya IPM akan mengakibatkan pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah mengakibatkan rendahnya perolehan pendapatan, sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Cladio Usman (2013), mengatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Program Keluarga Harapan (Program IPM) terhadap pengentasan kemiskinan. Selain itu, didukung juga oleh penelitian dari Fakkhul Mufid Cholili (2014), yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin yang ada di 33 provinsi di Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kesimpulan CFA (*Confirmatory Factor Analysis*)

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dengan menggunakan metode CFA (*Confirmatory Factor Analysis*) dapat disimpulkan:

- a. Uji CFA : Dari tabel KMO and Bartlett's Test, didapat nilai Kaiser Mayer Olkin (KMO) Sebesar 0,483 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,5. Nilai ini menandakan data belum valid untuk dianalisis lebih lanjut dengan Analisis faktor. Nilai uji Bartlett sebesar 183,989 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 di bawah 5%, maka matriks korelasi yang terbentuk merupakan matriks identitas, atau dengan kata lain model faktor yang digunakan sudah baik.
- b. Pada tabel total variance explained, ternyata terdapat tiga faktor atau komponen yang nilai eigenvalues-nya diatas 1 dengan nilai diatas 0,5 yaitu Tenaga Kerja, UKM (Usaha Kecil Menengah) dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Artinya hanya 3 variabel yang lanjut pada metode analisis selanjutnya.

2. Kesimpulan Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh tenaga kerja, UKM dan IPM terhadap kemiskinan melalui pengangguran sebagai variabel intervening di 5 Kab/Kota Sumatera Utara, dengan menggunakan metode analisis jalur (*path analysis*) . Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dituliskan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pada penelitian ini data dinyatakan normal, dan telah lulus uji autokorelasi.
- b. Pengangguran tidak berfungsi sebagai variabel intervening antara tenaga kerja terhadap kemiskinan di 5 Kab/Kota Sumatera Utara. Hal ini berarti tenaga kerja berpengaruh langsung terhadap kemiskinan tanpa pengangguran sebagai mediasi, jadi jika terjadi peningkatan tenaga kerja maka akan meningkatkan perolehan pendapatan masyarakat dan akan menurunkan angka kemiskinan. Begitup sebaliknya
- c. Pengangguran berfungsi sebagai variabel intervening antara UKM terhadap kemiskinan di 5 Kab/Kota Sumatera Utara. Hal ini berarti jika terjadi peningkatan pada UKM maka akan meningkatkan lapangan usaha kecil menengah dengan begitu akan menambah tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, berkurangnya pengangguran maka akan menurunkan angka kemiskinan.
- d. Pengangguran tidak berfungsi sebagai variabel intervening antara IPM terhadap kemiskinan di 5 Kab/Kota Sumatera Utara. Hal ini berarti IPM langsung mempengaruhi kemiskinan tanpa adanya pengangguran sebagai mediasi. Apabila terjadi peningkatan IPM, yang disertai dengan peningkatan pendidikan atau sumber daya manusia yang berkualitas maka akan meningkatkan produktivitas, peningkatan tersebut membuat perolehan pendapatan masyarakat meningkat dan akhirnya akan menurunkan angka kemiskinan

3. Kesimpulan Regresi Panel

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dengan menggunakan metode *Fixed Effect Model* dapat disimpulkan:

- a. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa model penelitian dapat dikatakan baik, dimana hasil estimasi R^2 hasil Estimasi persamaan adalah 69.08%. Hasil estimasi ini dapat diartikan bahwa variasi persamaan variabel independent terhadap variabel dependent sebesar 69.08%. Sementara sisanya sebesar 30,92% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.
- b. Nilai koefisien regresi Tenaga Kerja adalah sebesar 0,055 hal ini dapat diartikan apabila terjadi perubahan pada Tenaga Kerja sebesar 1% maka akan terjadi peningkatan Kemiskinan sebesar 0,055% dengan arah yang sama. Namun nilai prob t statistic $0,0001 < 0,05$ pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha=5\%$) sehingga dinyatakan pengaruh Tenaga Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan.
- c. Nilai koefisien regresi UKM (Usaha Kecil Menengah) adalah sebesar 0,043 hal ini dapat diartikan apabila terjadi perubahan pada UKM (Usaha Kecil Menengah) sebesar 1% maka akan terjadi peningkatan Kemiskinan sebesar 0,043% dengan arah yang sama. Namun nilai prob t statistic $0,789 > 0,05$ pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha=5\%$) sehingga dinyatakan pengaruh UKM (Usaha Kecil Menengah) tidak signifikan terhadap Kemiskinan.
- d. Nilai koefisien regresi IPM (Indeks Pembangunan Manusia) adalah sebesar 7,89 hal ini dapat diartikan apabila terjadi perubahan pada IPM

(Indeks Pembangunan Manusia) sebesar 1% maka akan terjadi peningkatan Kemiskinan sebesar 7,89% dengan arah yang sama. Namun nilai prob t statistic $0,01 < 0,05$ pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha=5\%$) sehingga dinyatakan pengaruh IPM (Indeks Pembangunan Manusia) berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan.

B. SARAN

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu

1. Pemerintah harus lebih giat dalam memperhatikan dan mendukung serta meningkatkan Usaha Kecil Menengah baik di perkotaan maupun dipedesaan. Pemerintah juga harus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dengan cara peningkatan pendidikan yang baik bahkan sampai jenjang perkuliahan. Seperti adanya beasiswa bagi siswa miskin dan beasiswa bagi siswa atau mahasiswa yang berprestasi sehingga mereka mampu menjadi tenaga kerja yang siap untuk masuk didunia kerja.
2. Pemerintah harus bisa membuka lowongan kerja baru setiap tahunnya agar pengangguran dapat berkurang dan kemiskinan dapat diatasi. Seperti member pelatihan dan meminjamkan modal dengan bunga rendah agar masyarakat mampu membuka usaha sendiri.
3. Pemerintah daerah harus saling bertukar pikiran dengan daerah lain yang tingkat kemiskinan rendah agar kemiskinan dapat diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspan, h., e.s. Wahyuni, s. Effendy, s. Bahri, m.f. Rambe, dan f.b. Saksiono. (2019). "the moderating effect of personality on organizational citizenship behavior: the case of university lecturers". *International journal of recent technology and engineering (ijrte)*, volume 8 no. 2s, pp. 412-416.
- Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of limited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.
- Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum". *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik". *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.
- Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.
- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397.
- Abdiyanto. (2016). *Ekonomi Kemiskinan*. Medan : USU Press.
- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran* (ed, 1 cet, 3), Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Arsyad, L. 2010. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.
- Badan Pusat Statistik. *Manado Dalam Angka 2008*. [http// www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- BPS. 2013. *PDRB Provinsi Jawa Timur*. Jawa Timur: BPS.
- BPS. 2013. *PDRB Provinsi Jawa Timur*. Jawa Timur: BPS.
- BPS. 2014. *susenas*. Jawa Timur: BPS.
- B. Siswanto Sastrohadiwiryo, 2003, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, edisi 2, Jakarta, PT. Bumi Aksara,
- Case, K., & Fair, R. 2002. *Principle Of Economic*. Jakarta: Prenhalindo.
- Erwan, Agus, Purwanto. 2007. *Mengkaji Potensi Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 10, Nomor 3. ISSN 1410-4946.
- Gan, Li. 2013. *The Challenge of High Inequality in China*. *Inequity in Focus*, Vol. 1 No. 2, (PP: 1-20).

- Gie, The Liang. 1999. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung
- Gravitiani, Evi. 2006. Analisis Shift-Share Dinamik pada Perekonomian Kota Yogyakarta, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 7(1): 35–48.
- Heru Nugroho, 1995. “Kemiskinan, Ketimpangan dan Pemberdayaan, dalam Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia”. Yogyakarta: Aditya Media.
- Hurd, Daniel dan Jenuings, Erin. (2016), *Standardized Educational Games Ratings: Suggested Criteria*. Karya Tulis Ilmiah.
- Husein, Umar. 2008. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada
- <https://langkahkab.bps.go.id/pressrelease/2018/08/23/181/pertumbuhan-ekonomi-langkat-tahun-2017>
- <https://sumut.antaranews.com/berita/112717/pertumbuhan-ekonomi-deli-serdang-capai-599-persen>
- http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2018/10/20/361902/pertumbuhan_ekonomi_kota_medan_diproyeksikan_6_5/
- <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/09/15/186638/pertumbuhan-ekonomi-tapsel-diperkirakan-melambat/>
- <https://www.tobapulp.com/csr-tpl-gairahkan-perekonomian-desa-di-kabupaten-simalungun/>
- Kaufman, Bruce E dan Julie L. Hotckiss, 2000. *The Economic of Labor Markerts*. Yogyakarta: BPFE UGM
- Kauffman, J. M., 2000. *Should You Take Aspirin To Prevent Heart Attack*. *Journal of Scientific Exploration*, Vol. 14, No. 4, pp. 623-641.
- Kuncoro, Mudrajad, 2000, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta: UPP AMD YKPN
- Kuncoro, Mudrajad, 2006, *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Lubis, Nureni, Hilda. 2017. *Analisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Ekskaresidenan Kedu, Banyumas, dan Semarang Tahun 2010-2015*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi Ketiga*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

- Mankiw, N. Gregory. 2000. *Teori Makro Ekonomi. Edisi Keempat*. Alih Bahasa: Imam Nurmawam. Jakarta: Erlangga
- Mankiw, N. Gregory. 2013. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Melly Nuraini. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Masyarakat: Studi Kasus Pada Masyarakat di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Skripsi Sarjana pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Moav, Omer. 2008. *Conspicuous Consumption, Human Capital and Poverty*. JEL, Vol. 1, No. 2, (PP: 1-31).
- Maisyarah, R. (2018). Analysis of the Determinants Competition Oligopoly Market Telecommunication Industry in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 760-770.
- Maisyarah, R., & Sofyardi, M. (2018, January). The Effect of Rice Subsidy on The Expenditure of Public Family Consumption And Welfare of Poor Households. In *1st Economics and Business International Conference 2017 (EBIC 2017)*. Atlantis Press.
- Nicholls, Lucius Sediaoetama. .2000. *Konsumsi Masyarakat Daerah*. Jakarta: Balai Pustaka Pustaka LP3ES..
- Nugroho, I., dan Dahuri, R., 2012, *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, Jakarta:
- Pascual, M. & Álvarez-García, S. (2006) *Government Spending And Economic Growth In The European Union Countries: An empirical Approach*. JEL, <http://ssrn.org>.
- Profan Ali. 2009. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan : Studi Kasus Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2007. *Jurnal Riset Ekonomi*, 1(3): h: 279-297.
- Purwanto, Erwan Agus. 2005. *Ups and Downs in Rural Javanese Industry*. Yogyakarta: Graha Guru.
- Putu,S.P.S. 2012. *Pengaruh PDRB Perkapita, Pendidikan dan Produktivitas Tenaga Kerja terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali*. E-Jurnal EP Unud, 3 (10): 431-439. ISSN: 2303-0178
- Rochmat Soemitro (2012). *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan*. Bandung: Graha Ilmu.
- Rosyidi, Suherman. 2002. *Pengantar Teori Ekonomi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Rusiadi, dkk. (2015). *Metode Penelitian Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan, Konsep, Kasus dan Aplikasi SPSS, Eviews, Amos dan Lisrel*. Cetakan Pertama. Medan : USU Press.
- Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus, 1999, *Ilmu Makro ekonomi. Edisi*

Ketujuh belas, Jakarta: PT. Media Global Edukasi

Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). Effect of Fiscal Independence and Local Revenue Against Human Development Index. *Int. J. Bus. Manag. Invent*, 6(7), 62-65.

Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). Effect of Fiscal Independence and Local Revenue Against Human Development Index. *Int. J. Bus. Manag. Invent*, 6(7), 62-65.

Sani, Achmad & Vivin Maharani. 2013. Metodologi Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Kuisisioner dan Analisis Data). Malang :UIN MALIKI Press. Cetakan Ke-2.

Sembiring, Rahmad. 2017. Dampak Perubahan Sosial Dalam Mempengaruhi Dan Kemiskinan Keluarga Nelayan Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram. Universitas Pembangunan Pancabudi. Medan.

Soemitro, Rochmat. 2014. Asas dan Dasar Perpajakan. Bandung : Refika Aditama.

Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat.

Subandi, 2011. *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta: Studi Kasus 5 Kabupaten/Kota*. Universitas Negeri Yogyakarta

Suharto, Edi. 2006. *Analisis Kebijakan Publi : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung : Alfabeta

Sukmaraga, Prima, 2011, Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah. Semarang; Skripsi, Fakultas Ekonomi Univesitas Diponegoro

Sukmawati, Sulia.U dan Prasetyoningrum, K. Ari. 2018. *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia*. Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 6, Nomor 2, 217-240. P-ISSN: 2355-0228

Sukirno, sadono, 2000. *Makro Ekonomi Modern*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sukirno Sadono, 2004. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat*. Universitas Andalas Padang

Sumodiningrat, Gunawan, (2000). Strategi Pembangunan dan Kemiskinan, Rineka Cipta: Bandung.

Supriyanto. 2016. *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan*. Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 3 Nomor 1

- Suryahadi, dkk. 2003. “*Minimum Wage Policy and Its Impact on Employment in the Urban Formal Sector*”. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(1),29-50.
- Suryawati, 2004. *Analisis Pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), Tingkat Investasi Dan Tingkat Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Utara*.
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith (2002). *Pembangunan Ekonomi*. Edisi kesembilan. Jakarta : Erlangga.
- Todaro, Michael P; Smith, C Stephen. 2006. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael P; Smith, C Stephen. 2006. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta:Earlangga.
- Vanderberg, Servaas. 2002. *Education, Income, Inequality and Poverty in South Africa*. Center Study of African Economies, (PP: 1-26).
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.